DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

RENCANA STRATEGIS 2016-2021

"MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG MERATA, DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN"

D A F T A R I S I

Halaman

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 4

1.3. Maksud dan Tujuan 5

1.3.1. Maksud 5

1.3.2. Tujuan 6

1.4. Sistematika Penulisan 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD **8**

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 8

2.1.1. Tugas 8

2.1.2. Fungsi 8

2.1.3. Struktur Organisasi SKPD 9

2.2. Sumber Daya SKPD 11

2.2.1. Sumber Daya Manusia 11

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD 15

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD…….. 21

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SKPD..... **22**

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.... 22

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ... 24

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi 25

3.3.1. Renstra Kementrian Pekerjaan Umum 26
3.3.1.1. Arah Strategi Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 33
3.3.2. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan 35
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 47
3.4.1. Rencana Tata Ruang Wilayah 47
3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis 50
3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis 51

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN **53**
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 53
4.1.1. Tujuan 53
4.1.2. Sasaran Jangka Menengah SKPD 54

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... **58**
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan SKPD 58
5.1.1. Strategi 58
5.1.2. Kebijakan SKPD 59

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..... **63**

BAB VII INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD..... **73**

D A F T A R G A M B A R

Halaman

Gambar 1.1 Hubungan Renstra SKPD yang mengacu kepada Dokumen Perencanaan RPJMD 4
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru 10
Gambar 3.1 Peta Strategi Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 28
Gambar 3.2 Tahapan Pembangunan Nasional 31
Gambar 3.3 Strategi Pembangunan Nasional 2015 – 2019 33

D A F T A R T A B E L

Halaman

Tabel 2.2.1.1. Sumber Daya Manusia PNS Berdasarkan Eselon 11

Tabel 2.2.1.2. Sumber Daya Manusia PNS Berdasarkan Golongan 11

Tabel 2.2.1.3. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Status Kepegawaian 11

Tabel 2.2.1.4. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan 12

Tabel 2.2.1.5. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Diklat yang Diikuti 12

Tabel 2.2.1.6. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin 12

Tabel 2.2.1.7. Daftar Asset/Modal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2017 12

Tabel 2.3.1. Pencapaian Renstra SKPD Periode Sebelumnya 15

Tabel 2.3.2. Realisasi Anggaran SKPD Periode Sebelumnya 17

Tabel 3.3.2.1 Sasaran, Kebijakan, Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan 41

Tabel 4.1.2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD 55

Tabel 5.1.2.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 60

Tabel 6.1.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru 65

Tabel 7.1.1. Indikator Kinerja SKPD Dalam RPJMD Kota Banjarbaru 71

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas karuniaNya, kami dapat menyusun Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru untuk Tahun 2016–2021, sesuai dengan yang amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib untuk menyiapkan Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Penyusunan Renstra ini merupakan penyesuaian (reviu) terhadap Renstra sebelumnya dimana terjadi perubahan nomenklatur SKPD sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang telah ditindaklanjuti dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjarbaru menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru. Namun Renstra ini tetap berpedoman pada RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 serta penjabaran visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru periode 2016-2021, yang terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2015.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru ini merupakan perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dalam meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance).

Dengan adanya Rencana Strategis ini akan sangat berguna bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru sebagai acuan dalam menyusun perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Walaupun Rencana Strategis ini sudah disusun dengan usaha maksimal, tetapi kiranya masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan kami. Dan oleh sebab itu kami dengan rendah hati dan rasa penuh keterbukaan dapat menerima saran – saran dan masukan dari semua pihak. Demikian Rencana Strategis ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Banjarbaru, 15 Oktober 2019

Kepala Dinas,

Ir. JAYA KRESHNA
Pembina Utama Muda
NIP. 19631105 199302 1 002

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dlam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Sedangkan perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan penga
lolasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan strategis adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun kedepan (Kerzner, 2001). Sedangkan dalam pemerintah daerah, Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (Renstra-SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

RENSTRA atau Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5(lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dijelaskan pula dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1) dan (2), yang berbunyi :" Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD" dan "Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah". Dan dipertegas lagi dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Nasional dalam Pasal 1 ayat (7) yang menyatakan : ”Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, strategi dan kebijakan, program dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Pengertian Renstra SKPD

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1(satu) sampai dengan 5(lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada Pasal 272 ayat 1 dan 2, yang menyatakan bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD” dan “Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan,sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah”. Selain yang ditunjukkan dalam Undang-Undang tersebut, pada Undang-Undang lainnya terutama pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 7 bahwa “Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”.

Dengan memperhatikan uraian-uraian pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5(lima) tahun yang memuat visi, misi, strategi, dan kebijakan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Fungsi Renstra SKPD Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah

Dalam Rencana Strategis SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru menjabarkan visi dan misi, menguraikan rincian daftar program dan kegiatan, serta menyediakan tolok ukur penilaian kinerja yang semuanya dapat berfungsi sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan Kota Banjabaru yang telah ditetapkan.

Selain itu juga dapat dinyatakan bahwa Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah sangat dibutuhkan sebuah satuan kerja perangkat daerah karena :

1. Sebagai terjemahan praktis dari visi, misi, tujuan dan sasaran SKPD.
2. Sebagai pedoman umum dalam perumusan kebijakan operasional SKPD.
3. Sebagai kerangka acuan umum dalam penyusunan program kerja tahunan SKPD.
4. Sebagai instrumen kontrol dan evaluasi pengelolaan SKPD dalam periode lima tahunan.
5. Sebagai jabaran dari kebijakan dasar dan perencanaan strategis SKPD.

Proses Penyusunan Renstra SKPD

Adapun proses penyusunan Renstra SKPD dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Banjarbaru melalui beberapa tahapan. Setiap tahapan membutuhkan proses kajian yang mendalam. Adapun tahapan penyusunan Renstra SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

1. Tahapan persiapan penyusunan Rencana Strategis SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru
2. Tahapan penyusunan rancangan Rencana Strategis SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru
3. Tahapan penyusunan rancangan akhir Rencana Strategis SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru
4. Tahapan penetapan Rencana Strategis SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru

Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja SKPD

Untuk mengetahui keterkaitan antara Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja SKPD dijelaskan dalam Gambar 1.1 berikut ini :

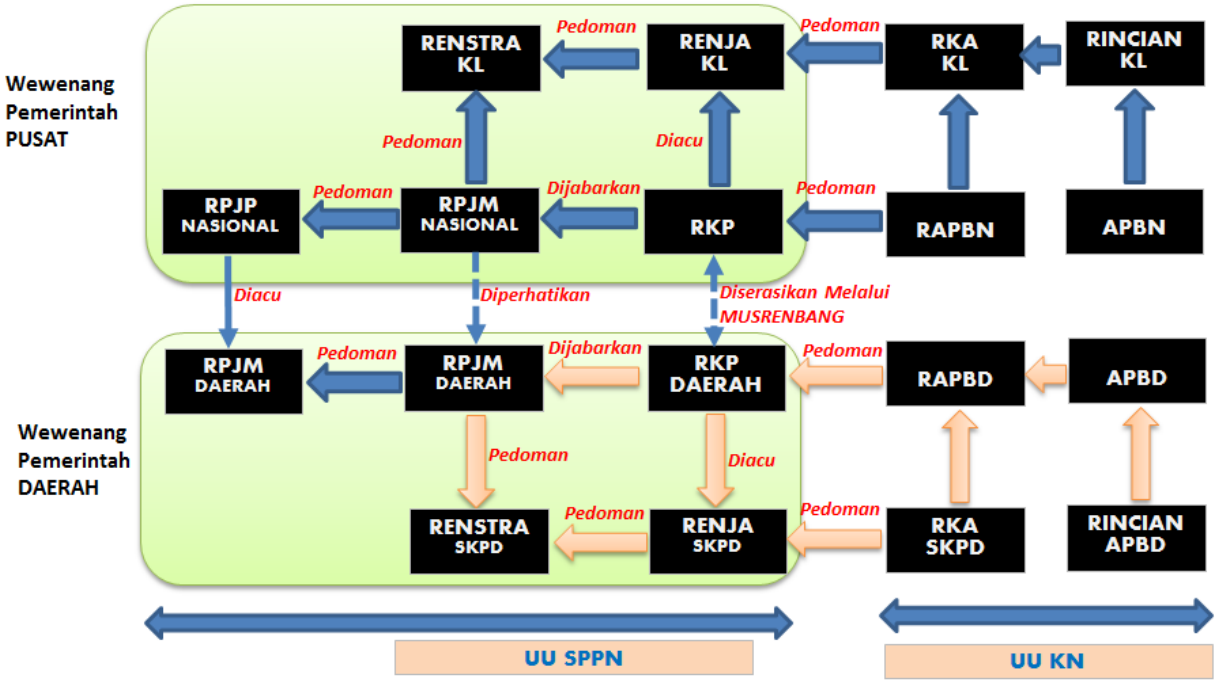

Gambar 1.1Hubungan Renstra SKPD yang mengacu kepada Dokumen Perencanaan RPJMD

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 ini, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai landasan hukum yakni antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
g. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru
h. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru
i. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1.Maksud

Rencana Strategis SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 disusun didasarkan dan berpedoman pada RPJMD Tahun 2016 – 2021 Pemerintah Kota Banjarbaru, dengan maksud sebagai landasan untuk melaksanakan capaian tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan tercapainya visi, misi dan program yang ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota di bidang Pekerjaan Umum pada 5 (lima) tahun kedepan.

Penyusunan Rencana Strategis SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk menghasilkan suatu rumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya

sehingga dapat terarah, efektif, efisien dan terpadu yang mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 juga akan menjadi acuan dan pedoman resmi seluruh unit organisasi lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan. Selain itu, Renstra SKPD ini juga sebagai bahan dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Banjarbaru yang dilaksanakan secara berjenjang.

1.3.2.Tujuan

Berdasarkan maksud di atas penyusunan Rencana Strategis SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 ini bertujuan untuk :

a. Menjabarkan visi, misi, program dan kegiatan pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru kedalam strategi pembangunan yang terarah,terinci, terukur dan integratif sehingga dapat diimplementasikan sejak Tahun 2016 hingga Tahun 2021.
b. Menjadi acuan resmi bagi seluruh unit organisasi lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.
c. Sebagai landasan dalam penetapan indikator kinerja dalam rangka evaluasi terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.
d. Mewujudkan proses administrasi yang sehat dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Renstra SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021adalah :

BAB I. PENDAHULUAN

1. *Latar Belakang*
2. *Dasar Hukum*
3. *Maksud dan Tujuan*
4. *Sistematika Penulisan*

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

1. *Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD*
2. *Sumber Daya SKPD*
3. *Kinerja Pelayanan SKPD*
4. *Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD*

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

1. *Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD*
2. *Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*
3. *Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi*
4. *Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis*
5. *Penentuan Isu-isu Strategis*

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. *Visi dan Misi SKPD*
2. *Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD*
3. *Strategis dan Kebijakan SKPD*

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan pada Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru

2.1.1. Tugas

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang Pekerjaan Umum yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.

2.1.2. Fungsi

Dalam melaksanakantugas tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pekerjaan umum, sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. Pelaksanaan administrasi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi SKPD

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru berdasarkan pada Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, TUgas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dengan susunan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
   a. Sub Bagian Perencanaan
   b. Sub Bagian Keuangan;
   b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :
   a. Seksi Pengembangan Prasarana Irigasi, Danau dan Rawa;
   b. Seksi Pengembangan Prasarana Sungai dan Waduk.
4. Bidang Bina Marga terdiri dari :
   a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
   b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
5. Bidang Cipta Karya terdiri dari :
   a. Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan;
   b. Seksi Pengembangan Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung.
6. Bidang Pengembangan Konstruksi , terdiri dari :
   a. Seksi Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi
   b. Seksi Pemelihara Peralatan dan Uji Mutu
7. Bidang Tata Ruang, terdiri dari :
   a. Seksi Perencanaan dan Penataan Ruang
   b. Seksi Pemanfaatan, Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang

Untuk lebih jelasnya mengenai Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dapat dilihat di bawah ini:

BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA
BANJARBARU

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA KOTA BANJARBARU
NOMOR : 49 TAHUN 2016
TANGGAL : 26 Oktober 2016

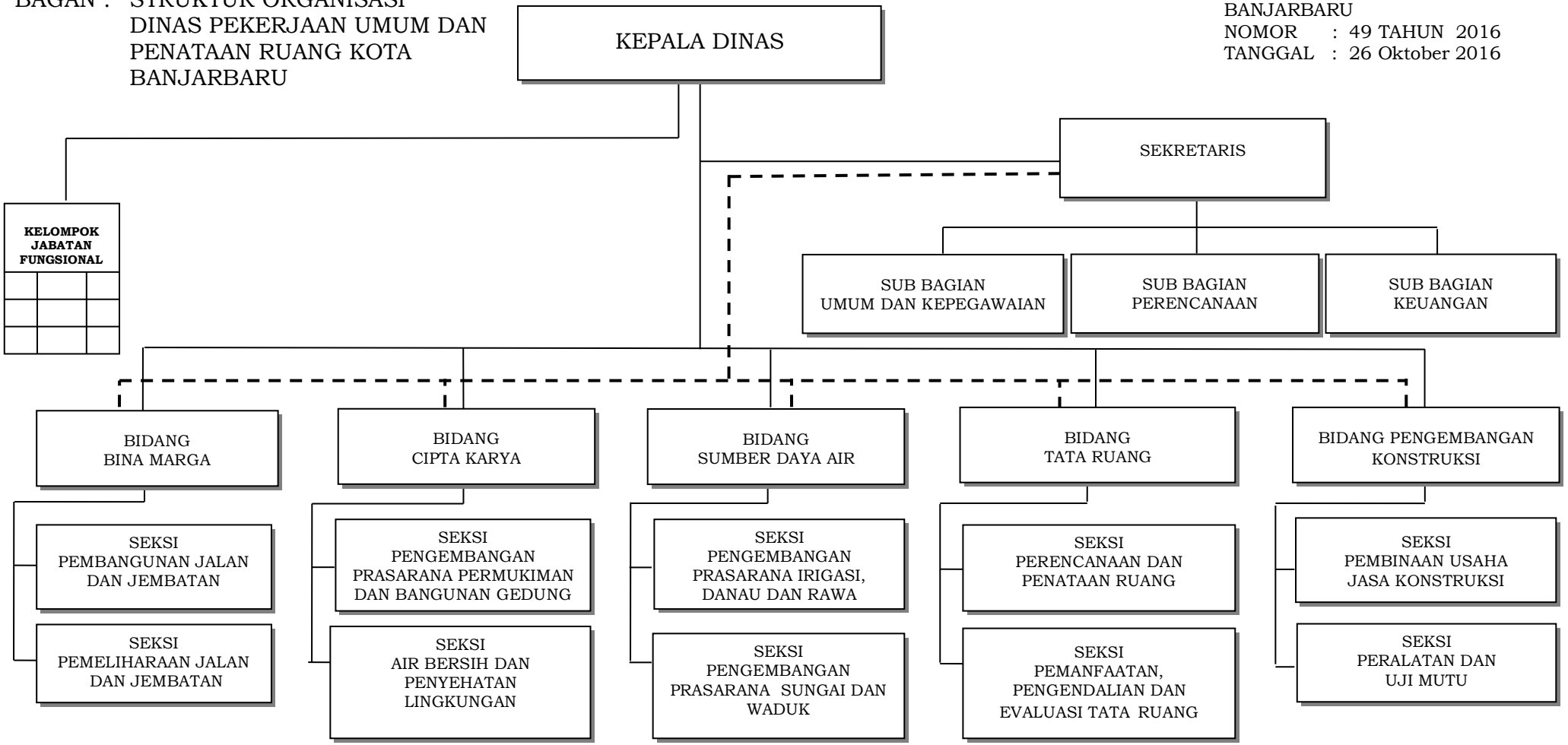

KETERANGAN :
———— : Garis Komando
- - - - : Garis Koordinasi

2.2. Sumber Daya SKPD

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru memiliki sumber daya manusia sebanyak 73 orang yang terdiri dari 52 orang PNS, 21 orang PTT/Tenaga Kontrak. Secara terinci mengenai sumber daya manusia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 2.2.1.1. Sumber Daya Manusia PNS Berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jumlah	Keterangan
1.	II	1 orang	
2.	III	6 orang	
3.	IV	13 orang	
	Jumlah	**20 orang**	

Tabel 2.2.1.2. Sumber Daya Manusia PNS Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah	Keterangan
1.	IV	9 orang	
2.	III	34 orang	
3.	II	7 orang	
4.	I	2 orang	
	Jumlah	**52 orang**	

Tabel 2.2.1.3. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status	Jumlah	Keterangan
1.	Pegawai Negeri Sipil	52 orang	
2.	Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kontrak	21 orang	
	Jumlah	**73 orang**	

Tabel 2.2.1.4. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Pasca Sarjana (S2)	11 orang	PNS: 10 orang PTT/Tenaga Kontrak: 1 orang
2.	Sarjana (S1)/DIV	36 orang	PNS: 24 orang PTT/Tenaga Kontrak: 12 orang
3.	Sarjana Muda (DIII)/Akademi	6 orang	PNS: 3 orang PTT/Tenaga Kontrak: 3 orang
4.	SMA	18 orang	PNS: 13 orang PTT/Tenaga Kontrak: 5 orang
5.	SMP	0 orang	PNS 0 orang
6.	SD	2 orang	PNS 2 orang
	Jumlah	**73 orang**	

Tabel 2.2.1.5. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Diklat yang diikuti

No	Jenis Diklat/Kursus	Jumlah	Keterangan
1.	Diklatpim Tk. II	1 orang	**Lulus**
2.	Diklatpim Tk.III	6 orang	**Lulus**
3.	Diklatpim Tk.IV	10 orang	**Lulus**
	Jumlah	**17 orang**	

Tabel 2.2.1.6. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Keterangan
1.	Laki-laki	44 orang	**PNS: 35 orang** **PTT/Tenaga Kontrak: 9 orang**
2.	Perempuan	29 orang	**PNS: 17 orang** **PTT/Tenaga Kontrak: 12 orang**
	Jumlah	**73 orang**	

Tabel 2.2.1.7. ***Daftar Asset / Modal Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2017***

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang / Register
1	**2**	**3**
1	Brand Kas	3
2	Filling Besi/Metal	13
3	Lemari Besi	13
4	Meja Komputer	7
5	Kursi Lipat	8
6	Meja Kayu/Rotan	8
7	P.C Unit/ Komputer PC	24
8	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	4
9	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	10
10	Lemari Es	2
11	Karpet	2
12	Televisi	5
13	Lap Top	11
14	Air Conditioning Unit	14
15	Dispenser	6
16	Printer	27
17	Unintemuptible Power Supply (UPS)	15
18	Stabilizer	2
19	TV Monitor	2
20	Air Blower	3
21	Kursi Kerja	20
22	Rak Piring	2
23	Meja Rapat	2
24	Meja Kerja Pejabat Es. II	1
25	Meja Kerja Pejabat Es. III	2
26	Kursi Kerja Pejabat Es. II	1
27	Kursi Kerja Pejabat Es. III	6
28	Kursi Kerja Pejabat Es. IV	11

29	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	12
30	Global Positioning System (GPS)	3
31	Buku Laporan Lain-lain	22
32	Industri Konstruksi dan perdagangan	3
33	Buku Umum Lain-lain	2
34	Camera Video	2
35	LCD Proyektor	4
36	Roll Meter	9
37	Peta (Map)	3
38	Note Book	7
39	Tustel	3
40	Core Sampler	1
41	Televisi	1
42	Drying Oven	1
43	General Laboratory Tool Lain-lain	1
44	Centrifuge Electric	1
45	Penetrometer	2
46	Infra Red	1
47	Laboratorium Set	4
48	CBR Lab. Set On 702	1
49	Extoder/Extruder	1
50	Heavy Duty Solution Balance	1
51	Speed Tester	1
52	Stop Watch	1
53	Automatic Area Meter	1
54	Digital Thermometer	1
55	Liquid/Scintilation Counter	1
56	Lightweight Concrete Test Hammer	1
57	Labu Saybolt Furol	1
58	Mesin Kompresor	1
59	Katrol	1
60	Kunci Khusus Untuk Alat Besar Darat	1
61	Tool Set	1

62	Battery Charger	1
63	Timbangan	1
64	Alat Laboratorium Lain-lain	4
65	Concrete Hammer Test	1
66	Generator	1

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Pencapaian Renstra SKPD Periode sebelumnya merupakan data dan informasi yang menggambarkan pencapaian – pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra SKPD Periode 2016 – 2021. Dalam Renstra SKPD Periode 2016 – 2021 bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3.1 Pencapaian Renstra SKPD Periode sebelumnya

No	Indikator Kinerja Sasaran / Outcome	Satuan	Target (Renstra 2016)	Realisasi	%
I.	**Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat**				
1.	Infrastruktur jaringan irigasi yang berfungsi	Ha	4.800	1.305	27,19
2.	Jaringan infrastruktur dan jaringan irigasi yang berfungsi	m’	48.669	34.074,08	70,01
3.	Infrastruktur jaringan irigasi yang berfungsi	m’	69.341	20.358	29,36
4.	Infrastruktur jaringan irigasi yang berfungsi	m’	69.341	20.358	29,36
				Rata-rata capaian	**38,98**
II.	**Tersedianya konektivitas wilayah kabupaten/kota**				
1.	Jalan yang dibangun	Km	2,01	3,535	175,87
2.	Jalan yang dibangun	Km	4,02	12,45	309,7
3.	Jalan yang dibangun	Km	4,02	12,45	309,7
4.	Jembatan yang dibangun	m’	16	15,5	96,88

No	Indikator Kinerja Sasaran / Outcome	Satuan	Target (Renstra 2016)	Realisasi	%
5.	Bertambahnya panjang jalan yang memliki drainase	Km	4,98	4,8904	98,2
6.	Berkuranganya panjang drainase jalan dalam kondisi rusak berat yang harus dinormalisasi	Km	4,30	4,501	104,67
				Rata-rata capaian	**182,5**
III.	**Meningkatnya kualitas layanan jalan kabupaten/kota**				
1.	Panjang jalan yang dipelihara	m’	13.708	13.708	100
2.	Panjang jalan yang dipelihara	m’	25.765	28.804	111,79
3.	Panjang jalan yang dipelihara	m’	25.765	28.804	111,79
4.	Terlaksananya peningkatan jalan lingkungan	m’	70.380	80.030	113,71
5.	Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik	m’	4.920	6.824	138.70
6.	Panjang jalan yang dipelihara	m’	1.200	2.200	183,33
7.	Berkurangnya panjang drainase jalan dalam kondisi rusak sedang yang harus dipelihara	m’	3.290	5.184	157,57
				Rata-rata capaian	**130,98**
IV.	**Meningkatnya kualitas layanan air minum permukiman perkotaan**				
1.	Sarana dan prasarana air minum terbangun	m’	29.450	29.450	100
2.	Sarana dan prasarana air minum terbangun	m’	29.450	29.450	100
3.	Sarana dan prasarana air minum terbangun	m’	19.603	19.093	97,4
4.	Sarana dan prasarana air minum terpelihara	m’	6.492	6.450	99,35
5.	Perencanaan dan pengendalian program	keg	1	1	100
				Rata-rata capaian	**99,35**
V.	**Meningkatnya kualitas sanitasi (air limbah, persampahan, dan drainase) permukiman perkotaan**				
1.	Sarana dan prasarana air limbah terbangun	unit	6	10	166,67
2.	Sarana dan prasarana air limbah terpelihara	unit	3	3	100
				Rata-rata capaian	**133,33**

Tabel 2.3.2 Realisasi Anggaran SKPD Periode sebelumnya

No	Program/Kegiatan	Anggaran		
		Alokasi	Realisasi	Rasio
1	2	3	4	5
1	**Program 1. Pembangunan Jalan dan Jembatan**	**102.143.916.272,00**	**90.972.738.700,00**	**89,06**
	Kegiatan 1. Pembangunan Jalan	19.687.415.070,00	13.874.981.500,00	70,48
	Kegiatan 2. Pembangunan Jembatan	2.348.934.730,00	1.880.230.250,00	80,05
	Kegiatan 3. Normalisasi Drainase Jalan Kota	16.001.671.650,00	13.635.107.850,00	85,21
	Kegiatan 4. Pembangunan Drainase Jalan Kota	13.776.101.372,00	11.497.593.700,00	83,46
	Kegiatan 5. Pembangunan Jalan (DAK)	49.842.073.650,00	49.812.618.000,00	99,94
	Kegiatan 6. Pembangunan Jalan (Pendamping)	487.719.800,00	272.207.400,00	55,81
2	**Program 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan**	**329.897.415,00**	**98.798.600,00**	**29,95**
	Kegiatan 1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat	208.360.115,00	33.542.600,00	16,10
	Kegiatan 2. Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi	69.999.950,00	57.194.500,00	81,71
	Kegiatan 3. Pengendalian dan Uji Mutu	51.537.350,00	8.061.500,00	15,64
3	**Program 3. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**	**135.536.790.031,00**	**131.365.668.787,00**	**96,92**
	Kegiatan 1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	16.716.623.857,00	15.195.283.535,00	90,90
	Kegiatan 2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK)	54.039.938.262,00	54.039.929.050,00	100,00
	Kegiatan 3. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Pendamping)	468.166.000,00	302.493.502,00	64,61
	Kegiatan 4. Perbaikan Jalan Lingkungan	6.488.115.300,00	6.367.065.800,00	98,13

No	Program/Kegiatan	Anggaran		
		Alokasi	Realisasi	Rasio
	Kegiatan 5. Peningkatan Jalan Lingkungan	50.874.175.100,00	48.756.077.900,00	95,84
	Kegiatan 6. Pemeliharaan Rutin Drainse Jalan Kota	4.185.488.400,00	4.131.274.000,00	98,70
	Kegiatan 7. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	2.764.283.112,00	2.573.545.000,00	93,10
4	**Program 4 Penyediaan Air Minum**	**24.478.542.250,00**	**24.062.214.500,00**	**98,30**
	Kegiatan 1 Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	4.859.361.800,00	4.604.350.800,00	94,75
	Kegiatan 2 Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum	1.149.314.000,00	1.090.168.000,00	94,85
	Kegiatan 3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	20.025.000,00	3.787.450,00	18,91
	Kegiatan 4 Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Minum (DAK)	17.959.999.000,00	17.940.031.200,00	99,89
	Kegiatan 5 Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Minum (Pendamping)	489.842.450,00	423.877.050,00	86,53
5	**Program 5 Penyediaan Sistem Air Limbah**	**2.614.127.850,00**	**2.554.452.400,00**	**97,72**
	Kegiatan 1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	2.106.398.900,00	2.069.975.400,00	98,27
	Kegiatan 2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	507.728.950,00	484.477.000,00	95,42
6	**Program 6. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya**	**39.218.929.568,00**	**35.800.602.504,00**	**91,28**
	Kegiatan 1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan irigasi	1.510.200.000,00	1.413.920.200,00	93,62
	Kegiatan 2. Rehabilitasi/Pemeliharaaan Normalisasi Saluran Sungai	4.872.203.000,00	4.663.693.000,00	95,72
	Kegiatan 3. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	32.343.008.568,00	29.298.287.804,00	90,59

No	Program/Kegiatan	Anggaran		
		Alokasi	Realisasi	Rasio
	Kegiatan 4. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Pendamping)	493.518.000,00	424.701.500,00	86,06
7	**Program 7. Pengendalian Banjir**	**17.984.855.800,00**	**13.702.354.950,00**	**76,19**
	Kegiatan 1. Pengembangan Pengelolaan Daerah Rawa dalam Rangka Pengendalian Banjir	17.984.855.800,00	13.702.354.950,00	76,19
8	**Program 8. Pembangunan Fasilitas Umum**	**3.381.275.700,00**	**522.455.250,00**	**15,45**
	Kegiatan 1. Pembangunan Fasilitas Umum	2.581.275.700,00	53.270.250,00	2,06
	Kegiatan 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Fasilitas Umum	800.000.000,00	469.185.000,00	58,65
9	**Program 9. Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**968.494.397,00**	**858.427.223,00**	**88,64**
	Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
	Kegiatan 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96.600.000,00	81.004.729,00	83,86
	Kegiatan 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
	Kegiatan 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	19.207.300,00	5.886.500,00	30,65
	Kegiatan 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.366.400,00	11.393.750,00	79,31
	Kegiatan 6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.312.697,00	7.971.755,00	64,74
	Kegiatan 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.397.000,00	5.280.000,00	97,83
	Kegiatan 8. Penyediaan Makanan dan Minuman	88.575.000,00	76.593.000,00	86,47
	Kegiatan 9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	416.976.000,00	355.237.489,00	85,19
	Kegiatan 10. Penyediaan Jasa Non PNS	283.260.000,00	283.260.000,00	100,00
10	**Program 10. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**32.721.087.540,00**	**30.750.653.010,00**	**93,98**
	Kegiatan 1. Pembangunan Gedung Kantor	31.664.772.540,00	29.897.847.710,00	94,42

No	Program/Kegiatan	Anggaran		
		Alokasi	Realisasi	Rasio
	Kegiatan 2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	31.250.000,00	26.229.000,00	83,93
	Kegiatan 3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	75.450.000,00	72.179.200,00	95,66
	Kegiatan 4. Pengadaan Mebeleur	21.500.000,00	21.285.000,00	99,00
	Kegiatan 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	300.000.000,00	185.431.000,00	61,81
	Kegiatan 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	400.000.000,00	396.148.000,00	99,04
	Kegiatan 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	31.690.000,00	26.439.000,00	83,43
	Kegiatan 8. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	183.125.000,00	116.674.100,00	63,71
	Kegiatan 9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	3.750.000,00	3.600.000,00	96,00
	Kegiatan 10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	9.550.000,00	4.820.000,00	50,47
11	**Program 11. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**82.242.850,00**	**47.761.400,00**	58,07
	Kegiatan 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.524.750,00	12.976.500,00	50,84
	Kegiatan 2. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	42.349.950,00	24.908.850,00	58,82
	Kegiatan 3. Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang	14.368.150,00	9.876.050,00	68,74
12	**Program 12. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong**	**12.027.824.150,00**	**10.611.413.950,00**	**88,22**
	Kegiatan 1. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	7.964.014.200,00	6.715.536.450,00	84,32
	Kegiatan 2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase Lingkungan	4.063.809.950,00	3.895.877.500,00	95,87

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Infrastruktur merupakan salah satu motor pendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan daya saing di dunia Internasional , disamping sektor lain seperti minyak dan gas bumi, jasa keuangan dan manufaktur. Melalui kebijakan pimpinan dukungan serta komitmen semua pihak untuk peningkatan pelayanan infrastruktur yang tepat, maka hal tersebut diyakini sebagai peluang untuk pengembangan pelayanan khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru yang secara keseluruhan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tuntunan masyarakat terhadap pelayanan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang terus meningkat sehingga perlu disikapi dan direspon secara positif dalam rangka memenuhi tuntunan masyarakat tentang pelayanan yang berkualitas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Hal tersebut menjadikan perhatian khusus Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dalam rangka mewujudkan good governance dan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat dibidang infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang.

Kondisi saat ini dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dirasa masih kurang optimal sehingga masih terlihat masih banyaknya sarana dan prasarana pekerjaan umum dan penataan ruang yang belum mantap dan belum tertangani secara optimal yang pada akhirnya dapat menghambat tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dalam meningkatkan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang kepada masyarakat.

Hal tersebut diatas diperlukan adanya langkah – langkah strategis guna pemecahan masalah, dengan demikian dibutuhkan aparatur yang berkualitas dan profesional serta berkomitmen guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan yang ada.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SKPD

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Berdasarkan pada Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan SKPD.

Sejak dimulainya era desentralisasi yang diawali dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 aparatur agar memiliki kemampuan, keterampilan, organisasi dan manajemen yang baik sehingga dapat melaksanakan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat. Desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk menentukan sendiri kebijakan pembangunan daerahnya. Salah satunya adalah wewenang pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan perencanaan pembangunan di daerahnya.

Dalam rangka turut mempercepat proses pembangunan daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru mempersiapkan perencanaan yang akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan infrastruktur yang dilakukan. Perencanaan tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi SKPD untuk mencapai target-target yang hendak dicapai. Salah satu dokumen perencanaan tersebut adalah dokumen Rencana Strategis SKPD atau Renstra SKPD. Merupakan dokumen yang berisi tentang Program Strategi

Pembangunan yang ingin diwujudkan oleh SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dalam lima tahun kedepan.

Namun demikian penentuan target – target dan indikator kinerja Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) ini bukannya tanpa masalah, pencapaian pembangunan infrastruktur yang ingin dicapai dan tertuang di Renstra SKPD kadang tidak sesuai / mencapai target yang telah ditetapkan.

Di samping itu juga, organisasi publik (dalam hal ini SKPD) seringkali dipersepsikan sebagai organisasi yang lemah dalam persoalan akuntabilitas. Minimal ada 2 (dua) sebab utama lembaga publik dipersepsikan seperti itu, yaitu : *Pertama*, lemahnya sisi indikator kinerja dalam menyusun suatu program atau kegiatan. *Kedua*, kurang jelasnya tugas pokok dan fungsi untuk menjabarkan indikator kinerja (Solihin, 2007). Akuntabilitas tidak hanya ditekankan pada saat evaluasi pembangunan, namun tak kalah penting adalah pada saat perencanaan. Akuntabilitas pada tahap perencanaan menekankan pada pertanggungjawaban penilaian kinerja pada tahap perencanaan (*ex-ante*), yakni sejauh mana perencanaan dapat memberikan gambaran dan ukuran-ukuran yang tepat atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dengan demikian, maka akuntabilitas perencanaan menetapkan pada penetapan indikator-indikator kinerja sebagai basis penilaian atau memperjelas tentang *what, how, who* dan *when* suatu program dan kegiatan akan dilaksanakan. Disamping itu, indikator kinerja juga berfungsi menciptakan konsensus yang dibangun oleh *Stakeholders* serta membangun dasar pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja pembangunan.

Masalah penting lainnya dalam perencanaan pembangunan infrastruktur adalah permasalahan pendanaan yang berada diatas kemampuan seharusnya pemerintah daerah, sehingga pada akhirnya, dari waktu kewaktu, pemerintah daerah selalu menghadapi permasalah pembangunan yang sama. Permasalahan-permasalahan dalam perencanaan pembangunan tersebut merupakan permasalahan yang lazim yang biasa dihadapi oleh SKPD salah satunya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKota Banjarbaru.

Disamping permasalahan-permasalahan pembangunan tersebut, Kota Banjarbaru juga kini tengah dihadapi oleh beberapa tantangan strategis. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut tentu tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang harus ditemukan solusi yang terbaik.

Adapun permasalahan yang dihadapi tersebut adalah :

1. ***Masalah Pembangunan Sumber Daya Manusia***

   Permasalahan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia, merupakan 2 (dua) faktor dasar yang mempengaruhi adalah ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan.

2. ***Masalah Pembangunan Infrastruktur***

   Perlunya Peningkatan Pelayanan Pembangunan Infrastruktur yang optimal agar dapat menyentuh dan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

3. ***Masalah Pembangunan Birokrasi Pemerintah***

   Dasar dari Pembangunan Birokrasi Pemerintah adalah reformasi birokrasi, penerapan reformasi birokrasi di semua tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru melalui pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang kontinu dan berstandar dengan tujuan akhir memberikan pelayanan prima bagi masyarakat dan stake holder yang terkait.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah disampaikan oleh Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru untuk Tahun 2016-2021 adalah :

“TERWUJUDNYA BANJARBARU
SEBAGAI KOTA PELAYANAN YANG BERKARAKTER”

KOTA PELAYANAN adalah Kota yang memberikan pelayanan secara optimal kepada warga masyarakat dan yang berkunjung di Kota Banjarbaru.

BERKARAKTER Terdiri Atas Dua Aspek Penting Yaitu :

1. Sumber daya manusia yang berkarakter, yaitu terciptanya sumber daya manusia yang sehat, mempunyai etos kerja tinggi dan berakhlak mulia berdasarkan nilai-nilai religius.
2. Kota yang berkarakter, yaitu sebuah kota yang mempunyai ciri khas sebagai kota yang tertata/direncanakan (*urban design*) sehingga menjadi tempat hunian yang indah, aman dan nyaman yang berwawasan lingkungan.

Sedangkan untuk mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan Misi Kota Banjarbaru untuk Tahun 2016-2021 :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berdaya saing dan berakhlak mulia.
2. Meningkatkan penyediaan infrastruktur perkotaan yang merata, cerdas dan berwawasan lingkungan.
3. Memperkuat kemandirian, peningkatan kerjasama investasi, penyediaan prasarana dan sarana perekonomian, peningkatan kelembagaan dan peluang kewirausahaan.
4. Melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi.
5. Memperkuat cipta kondisi masyarakat yang aman, nyaman, dan tertib.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktorlingkungan strategisyang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Dalam merumuskan Misi Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 mengacu kepada RPJPD Kota Banjarbaru dan Misi Kepala Daerah terpilih.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi

Untuk penyusunan rancangan Renstra SKPD dilakukan review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi yang mencakup :

a. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L ;
b. Program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas ;
c. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra SKPD Provinsi ; dan
d. Program prioritas SKPD Provinsi dan target kinerja serta lokasi program prioritas

3.3.1. Renstra Kementrian Pekerjaan Umum

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015–2019 telah disusun sebagai dokumen perencanaan dan acuan penganggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk periode lima tahun mendatang.

Substansi Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015–2019 merupakan penjabaran dari Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. RPJMN merupakan tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 dan memuat Agenda Prioritas Nasional Presiden Republik Indonesia ke-7.

TUJUAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju di akhir periode perencanaan.Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi serta dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019. Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara umum adalah menyelenggarakan infrastrukutur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan yang *produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan*

pembangunan, *memenuhi kebutuhan dasar*, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera.

Lebih lanjut, tujuan tersebut di jabarkan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan;
2. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
3. Menyelenggaraan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistic nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusiaIndonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”;
5. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekertariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efiesien, transparan dan akuntabel.

Goals Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat *(dampak/Impact* pada level *stakeholders)* yang dalam hal ini merupakan kondisi yang mencerminkan dampak dari pengaruh hasil sasaran-sasaran strategis (outcome/impact pada level customer yang dilayani) yaitu meningkatnya kehandalan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mewujudkan: kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; dan keseimbangan pembangunan antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan sehingga dapat memenuhi

kesejahteraan masyarakat. Adapun peta strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat lihat pada Gambar 3.1.

Sementara sasaran strategis (*outcome/impact* pada level *customers)* dalam hal yang mencerminkan dampak dari pengaruh hasil sasaran-sasaran strategis (*outcome/impact* pada level *customer yang dilayani*) yaitu meningkatnya kehandalan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mewujudkan: kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; dan keseimbangan pembangunan antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat.

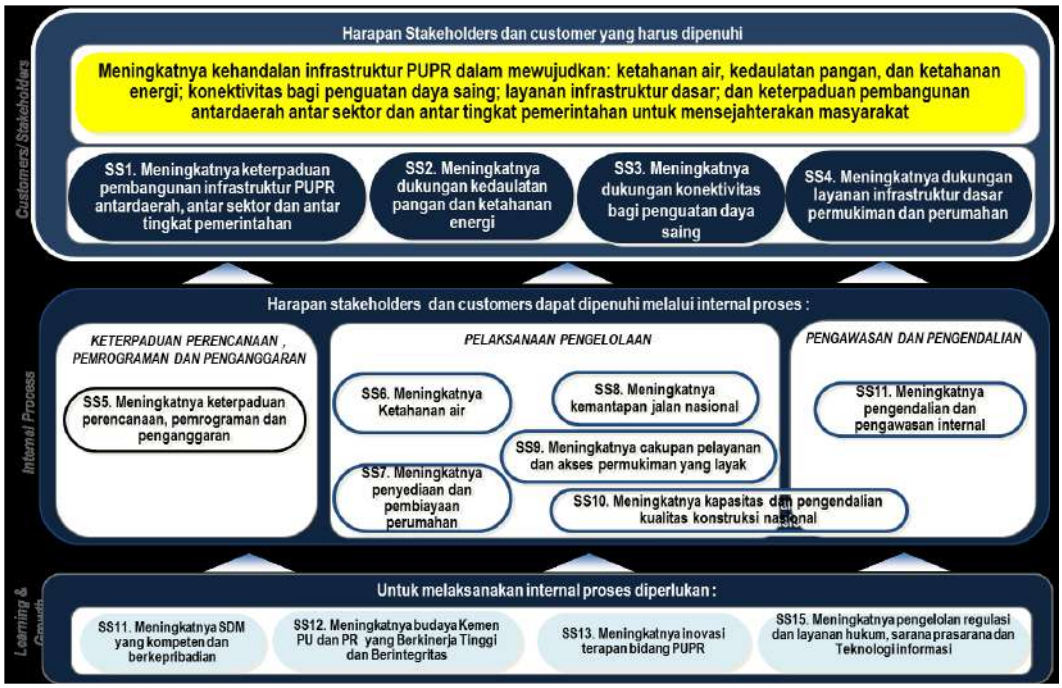

Gambar 3.1

Peta Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kemudian agar kebutuhan *customers* dapat terpenuhi maka diperlukan upaya-upaya dalam internal proses yang harus dilakukan dengan baik, yaitu:

1. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran
2. Meningkatnya ketahanan air.
3. Meningkatnya kemantapan jalan nasional.

4. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman
5. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan.
6. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.
7. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan.

Untuk menjamin terlaksananya proses internal yang efektif dan efisien guna memenuhi harapan *stakeholders* dan *customers* tersebut diatas maka diperlukan upaya-upaya pengelolaan sumber daya organisasi melalui proses *learning and growth*, yang meliputi :

1. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas.
2. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas.
3. Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
4. Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, sertasarana dan prasarana.

Selanjutnya keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Tujuan 1: Menyelenggarakan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yangterpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal,kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan. Tujuan 1 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:
   a. Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan
   b. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran.
   c. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.

2. Tujuan 2: Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahanrakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan

   energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi. Tujuan 2 ini akan dicapai melalui

sasaran strategis, yaitu:

a. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan energi; dan

b. Meningkatnya ketahanan air.

3. Tujuan 3: Menyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim. Tujuan 3 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:

a. Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing; dan

b. Meningkatnya kemantapan jalan nasional

4. Tujuan 4: Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip "infrastruktur untuk semua",

akan dicapai melalui sasaran strategis:

a. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan.

c. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan

5. Tujuan 5: Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efiesien, transparan dan akuntabel. Tujuan 5 iniakan dicapai melalui sasaran srategis, yaitu:

a . Meningkatnya pengendalian dan pengawasan.

b. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas.

c. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas

d. Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan

umum danperumahan rakyat

e. Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana

ARAH KEBIJAKANKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Pembangunan jangka panjang nasional ditetapkan dalam UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN yang saat ini telah sampai pada tahap ketiga, diarahkan untuk mempersiapkan proses tinggal landas menuju masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, yaitu dengan memantapkan pembangunan yang menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian pada daya saing kompetitif, perekonomian berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.

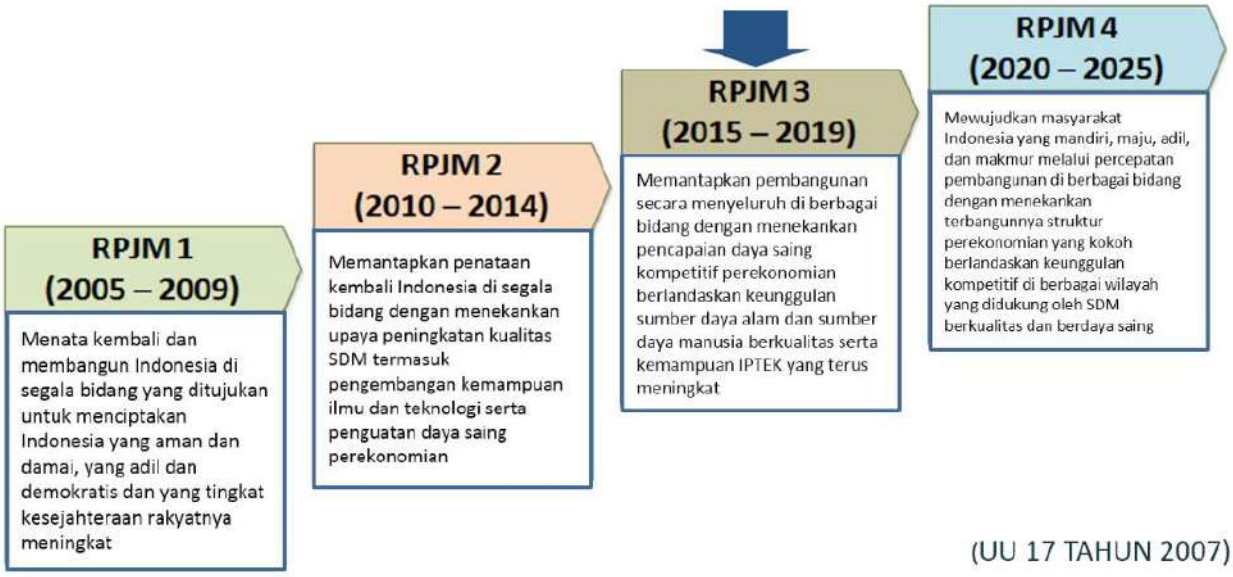

Gambar 3.2

Tahapan Pembangunan Nasional

Strategi pembangunan nasional selama 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 berdasarkan kepada :

A. Norma Pembangunan, meliputi antara lain:

(1) membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat;

(2) setiap upaya meningkatkan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan;

(3) aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.

B. Dimensi Pembangunan;

1. Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat.

Pembangunan mental dan karakter menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, tidak hanya di birokrasi tetapi juga pada seluruh komponen masyarakat.

2. Dimensi pembangunan sektor unggulan.

Hal ini meliputi kedaulatan pangan, ketahanan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri. Terkait dengan kedaulatan pangan, Indonesia mempunyai modal untuk memenuhi kebutuhannya, agar tidak tergantung kepada negara lain. Potensi sumber daya air yang besar dan terbarukan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemenuhan ketahanan energi dan ketenagalistrikan, sedangkan potensi kemaritiman dan kelautan harus dapat dimanfaatkan secara optimal.Potensi keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang unik merupakan modal pengembangan pariwisata nasional, sedangkan potensi industri untuk penciptaan nilai tambah.

3. Dimensi pemerataan dan kewilayahan.

Pembangunan harus meminimalkan kesenjangan, baik antar kelompok pendapatan, maupun antar wilayah, serta untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dengan prioritas pada wilayah desa, wilayah pinggiran, luar Jawa, dan Kawasan Timur.

A. Kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil.

Hal ini meliputi kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tatakelola dan reformasi birokrasi.

B. *Quickwins.*

Quickwins dilakukan agar *output* pembangunan segera dapat terwujud dan dirasakan hasilnya dan sekaligus dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.

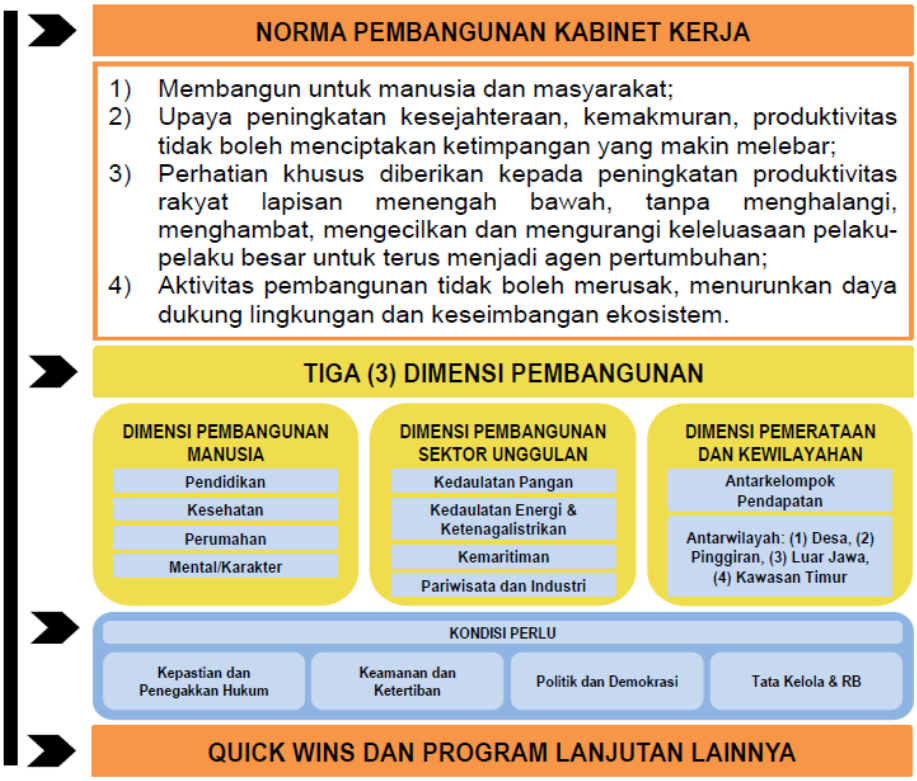

Gambar 3.3.

Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019

3.3.1.1 ARAH STRATEGI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mendukung pencapaiaan agenda pembangunan Nasional adalah mengacu kepada RPJMN 2015- 2019 dan berbasiskan pada eterpaduan infrastruktur wilayah, sesuai dengan rumusan tujuan yaitu :

A. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan

1. Keterpaduan Infrastruktur Wilayah.

Pengembangan wilayah pada tahun 2015-2019 ditujukan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan wilayah antara KBI dan KTI melalui percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah dengan menekankan keunggulan kompetitif perekonomian daerah berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia berkualitas, penyediaan infrastruktur, serta meningkatkan kemampuan ilmu dan teknologi secara terus menerus. Untuk mendorong pengembangan wilayah tersebut perlu adanya keterpaduan pembangunan baik antar sektor, antarwilayah, antar kawasan, maupun antar pemerintahan.

Untuk mewujudkan keterpaduan pengembangan infrastruktur wilayah tersebut akan dicapai melalui sasaran strategis:

1) Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan, dengan sasaran program: Meningkatnya keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pengembangan kawasan strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan, yang akan dicapai melalui strategi:
   a. Perencanaan pengembangan kawasan dan koridor
   b. Pengembangan infrastruktur untuk keterpaduan kawasan, meliputi:
      a) Pelaksanaan percontohan/inkubasi pengembangan kawasan;
      b) Pengembangan kota baru dan cerdas (*smart cities*);
      c) Peremajaan perkotaan melalui *urban redevelopment*/*urban renewal*
   c. Pelaksanaan NSPK pengembangan kawasan strategis dan kawasan perkotaan;
   d. Pelaksanaan dan fasilitasi percepatan pengadaan tanah

2) Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran, dengan sasaran program Meningkatnya keterpaduan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR dengan pengembangan kawasan strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan, yang akan dicapai melalui strategi:
   a. Perencanaan jangka panjang dan jangka menengah dan jangka pendek, meliputi:
      a) Penyusunan kebijakan teknis keterpaduan perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR dengan pengembangan wilayah;
      b) Penyusunan strategi nasional pengembangan perkotaan;

c) Penyusunan Rencana Terpadu Pembangunan Infrastruktur PUPR 7 Pulau/Kepulauan;
d) Penyusunan skema pembiayaan infrastruktur PUPR;
e) Penyusunan indeks rasio infrastruktur;
f) Evaluasi dampak manfaat keterpaduan infrastruktur;
g) Perumusan rekomendasi dukungan infrastruktur pada sektor yang terkait PUPR.

b. Pemrograman jangka menengah dan jangka pendek, meliputi:
a) Sinkronisasi program jangka pendek dalam entitas wilayah (pulau/kepulauan, kawasan strategis, kawasan perkotaan);
b) Evaluasi kinerja keterpaduan;
c) Evaluasi kelayakan/kesiapan program dan kegiatan;

c. Perencanaan penguatan kelembagaan dalam rangka keterpaduan.

3.3.2. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2020 memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam bidang pekerjaan umum di provinsi Kalimantan Selatan. Dokumen tersebut disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja Dinas PU Provinsi Kalimantan Selatan, serta isu – isu dan factor strategis selama (5) tahun yang akan datang, baik pada tingkat global, nasional, provinsi Kalimantan Selatan, maupun tingkat kabupaten/kota serta dilengkapi sasaran yang hendak dicapai pada periode tahun tersebut.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya disingkat Renstra Dinas PU Prov Kalsel Tahun 2016 – 2020 adalah dokumen perencanaan 5(lima) tahun untuk menjadi dasar program dan kegiatan ke-PU-an yang berkelanjutan. Adanya perubahan pola aspirasi dari masyarakat bawah, mendorong pembangunan di daerah dimulai dari kearifan dan budaya lokal, bersumber dari kebutuhan dasar masyarakat, sehingga menciptakan suatu situasi dan kondisi yang memungkinkan untuk mengembangkan potensi daerah unggulan.Dimana pembangunan

Infrastruktur dilaksanakan dengan prinsip desentralistik, partisipatif, demokrasi dan keterbukaan.

Penyusunan Renstra Dinas PU Prov Kalsel dimaksudkan untuk menyiapkan instrument perencanaan yang memberikan gambaran kebijakan dan strategi ke-PU-an di Provinsi Kalimantan Selatan pada periode Tahun 2016 – 2020 sebagai indikator kinerja dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas PU Prov Kalsel.

Tujuan Renstra Dinas PU Prov Kalsel 2016 – 2020 bertujuan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas PU Prov Kalsel, yang disesuaikan dengan tuntutan perubahan yang terjadi di masyarakat serta mengacu pada kebijakan tingkat nasional dan provinsi serta Rencana Pembangunan jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

VISI, MISI DINAS PU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Memperhatikan visi pembangunan Kalimantan Selatan tahun 2016-2020:

"Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri dan Berdaya Saing"

maka dalam kerangka mendukung pencapaian visi itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan visi Tahun 2016-2020 adalah:

"***Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Berkualitas dan Handal Secara Berkelanjutan Dalam Mendukung Kalsel Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri dan Berdaya Saing"***

dengan pengertian sebagai berikut:

Infrastruktur mencakup seluruh prasarana dan sarana ke-PU-an, termasuk prasarana sarana dasar sanitasi dan air minum yang berkualitas dan handal untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan.Kondisi dan kualitas pelayanan tersebut dibarengi dengan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang semakin

luas, merata dan berkeadilan, sehingga tercipta kehidupan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan yang mencerminkan keadaan masyarakat yang semakin sejahtera dan berwawasan serta ramah lingkungan.

Untuk melaksanakan visi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan menjabarkannya ke dalam misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan tata ruang yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan serta kesekertariatan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang ketat.
2. Mempercepat pembangunan bidang ke-PU-an dan tata ruang yang berwawasan dan ramah lingkungan.
3. Melaksanakan pembinaan sumberdaya manusia dan usaha/ penyedia jasa konstruksi untuk meningkatkan daya saing kemandirian di bidang ke-PU-an dan tata ruang.

Oleh karena itu pembangunan ke-PU-an dan tata ruang bertujuan agar masyarakat menikmati hasil pembangunan infrastruktur, terutama prasarana dan sarana sumberdaya air, jalan dan jembatan, prasarana dan sarana cipta karya serta lingkungan bersih dan sehat dalam rangka meningkatkan kualitas, derajat hidup dan kesejahteraan masyarakat tanpa mengenyampingkan masalah kelestarian sumber daya alam dan keserasian lingkungan hidup. Keberhasilan dalam pembangunan tersebut diharapkan dapat memberikan arah pertumbuhan wilayah dan pola tata ruang untuk turut menggerakkan pertumbuhan perekonomian daerah serta mendorong kegiatan di sektor riil lainnya yang nantinya membuka kesempatan kerja dan berusaha.

1. Strategi
   - **a.** Strategi kebijakan pembangunan wilayah, merupakan upaya untuk membentuk struktur ruang melalui pembangunan sistem prasarana primer jalan dan pengairan guna mewujudkan pola pemanfaatan ruang yang serasi dan seimbang mendukung sektor-sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, industri dan pariwisata agar berkembang berintegrasi, sesuai potensi dan daya dukung sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan sumber daya manusia yang ada dan yang dikembangkan.
   - **b.** Strategi kebijakan pembangunan perkotaan, ditujukan untuk membentuk struktur ruang melalui keterpaduan pembangunan jaringan prasarana kota guna mewujudkan

pola pemanfaatan ruang secara optimal, efektif dan efisien dengan mengacu kepada rencana tata ruang wilayah.

c. Strategi kebijaksanaan pembangunan perdesaan. Pada skala kawasan permukiman pedesaan, pembangunan sarana dan prasarana pekerjaan umum dengan pola program pembangunan prasarana desa/kelurahan terpadu diprioritaskan pada desa-desa pusat pertumbuhan, desa-desa penyangga, desa miskin dan terisolir dengan meningkatkan fasilitas prasarana desa melalui pembangunan yang bertumpu pada keswadayaan masyarakat.

1)Strategi Sumberdaya Air

- Meneruskan pengembangan prasarana dan sarana sumberdaya air.
- Mempertahankan dan mengoptimalkan pelayanan prasarana dan sarana irigasi yang telah dibangun baik teknis, sederhana dan irigasi desa.
- Mempertahankan dan mengoptimalkan pelayanan prasarana dan sarana rawa yang dibangun baik rawa pasang surut maupun non pasang surut.
- Meminimalkan dampak akibat daya rusak air.
- Membangun sistem informasi sumberdaya air yang handal.

2)Strategi Bina Marga

- Menjamin tetap lancarnya prasarana perhubungan didalam pelayanan jalan dan jembatan sehingga dapat selalu melayani kebutuhan lalu lintas sesuai volume yang terus berkembang.
- Meminimalkan jalan-jalan kritis yang masih ada, dan berusaha meningkatkan panjang jalan yang berstatus tidak mantap menjadi mantap.
- Membangun jalan/ jembatan baru dalam mengimbangi pertumbuhan lalu lintas dan perkembangan wilayah.
- Dalam menyelesaikan sasaran pembangunan diusahakan menempuh cara tahapan, sasaran fungsional tidak perlu dicapai sekaligus melainkan secara bertahap sehingga sebelum sasaran keseluruhan dapat diselesaikan pada tahun-tahun pertama pembangunan prasarana telah berfungsi.
- Dalam memenuhi standar pembangunan ditempuh cara pertahapan artinya persyaratan standar teknis terbaik akan dicapai secara bertahap.

3) Strategi Bidang Cipta Karya

- Melaksanakan kebijakan dan strategi perkotaan nasional yang akan memberikan arah yang jelas dan terukur bagi perencanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan.
- Meningkatkan koordinasi pengaturan, integrasi, perencanaan dan sinkronisasi program dan penganggaran berdasarkan skala prioritas dengan pemerintah pusat dan kabupaten/ kota dalam rangka dukungan penyusunan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan sebagai bagian dokumen perencanaan pembangunan kota, dan penyusunan rencana program investasi yang terpadu antara pengembangan wilayah/ kawasan dengan pengembangan bidang cipta karya
- Mendukung peningkatan pembangunan prasarana dan sarana permukiman yang dikaitkan dengan upaya perwujudan fungsi-fungsi kota sebagai pusat kegiatan nasional, wilayah dan strategis nasional serta perwujudan keterkaitan dengan wilayah perdesaan
- Mendukung pengembangan prasarana dan sarana permukiman di kawasan agropolitan, minapolitan sejalan dengan upaya pemerataan pembangunan
- Mengembangan parsaran dan sarana permukiman untuk mewujudkan kawasan permukiman yang ramah lingkungan termasuk RTH
- Mendukung pengembangan prasarana dan sarana permukimnan yang dapat meningkatkan daya saing kota melalui pemanfaatan potensi local
- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta penyebarluasan informasi dan bimbingan teknis kepada masyarakat di bidang cipta karya
- Menumbuhkan prakarsa, meningkatkan peranserta masyarakat dan mengembangkan swadaya masyarakat dalam pembangunan ciptakarya.
- Mengembangkan industri serta produksi bahan bangunan yang memenuhi syarat teknis dan kesehatan serta terbuat dari bahan-bahan setempat.

4) Strategi Bidang Tata Ruang Kawasan dan Bina Konstruksi

- Pengembangan Jaringan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berbasis tata ruang
- Pengembangan pusat-pusat pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pelayanan kawasan strategis

- Pengembangan SDM, perangkat dan kelembagaan perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kws strategis dan perkotaan
- Peningkatan koordinasi pengelolaan sumber daya ruang antar wilayah dan antar sector diantara para pemengku kepentingan
- Melaksanakan pembinaan penyelenggara dan penyedia jasa konstruksi yang seirama dengan kebijakan nasional bidang jasa konstruksi
- Terlaksananya pembinaan jasa konstruksi di daerah
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi
- Mengembangkan prakarsa koordinasi antara penyelenggara dan penyedia jasa konstruksi

5) Strategi Balai Pengembangan teknologi dan konstruksi

- Meningkatkan peran dan kompetensi laboratorium pengujian
- Mengembangkan penelitian teknologi konstruksi yang adaptif terhadap potensi local kalsel
- Meningkatkan pengembangan dan pelayanan informasi teknologi konstruksi.

6) Strategi Balai Pengembangan teknologi dan konstruksi

- Peningkatan kemampuan/kompetensi sumberdaya (manusia dan peralatan) Laboratorium Pengujian
- Peningkatan akreditasi Laboratorium Pengujian
- Peningkatan pengembangan pengkajian/penelitian teknologi konstruksi yang berdaptasi terhadap potensi lokal
- Peningkatan pelayanan informasi konstruksi

2. Kebijakan

Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut :

1. Mempertahankan dan mengoptimalkan pelayanan prasarana dan sarana irigasi / rawa yang telah terbangun baik teknis, sederhana dan irigasi desa.

2. Menjamin tetap lancarnya prasarana perhubungan dalam pelayanan/ pengelolaan jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap lainnya, sehingga dapat selalu melayani kebutuhan lalu lintas sesuai volume yang terus berkembang.
3. Meningkatkan kualitas hunian, lingkungan bersih dan sehat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengenyampingkan kelestarian sumber daya alam dan keserasian lingkungan hidup.
4. Meningkatkan kualitas SDM penyelenggaran dan penyedia jasa konstruksi untuk meningkatkan daya saing kemandirian di bidang ke-PU-an serta penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan.
5. Meningkatkan pengkajian, pengujian dan pengembangan teknologi serta pelayaan informasi konstruksi

TABEL 3.3.2.1

SASARAN, KEBIJAKAN, PROGRAM

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Sasaran		Cara Mencapai Tujuan & Sasaran	
		Kebijakan	**Program**
1	Meningkatkan pelayanan perangkat kebijakan, pedoman rencana pembangunan dan evaluasi program administrasi Dinas PU	Mengoptimalkan koordinasi perencanaan dengan unit terkait dalam rangka mewujudkan program pembangunan	Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur **Peningkatan Disiplin Aparatur** **Pembangunan Sistem Informasi Database ke-PU-an**
2	Meningkatkan Keterpaduan pengembangan infarstruktur KSP	Meningkatkan peranan tata ruang kawasan sebagai arah kebijakan pembangunan bidang pekerjaan umum Pengurangan kesenjangan pembangunan dan pengembangan wilayah. Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan tampung lingkungan. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perekonomian wilayah yang produktif, efisien dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional	Program Penataan Ruang

Sasaran		Cara Mencapai Tujuan & Sasaran	
		Kebijakan	**Program**
3.	Meningkatkan Infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air	Meneruskan pembangunan Prasarana & Sarana pekrerjaan umum bidang pengairan Mempertahankan & mengoptimalkan pemberdayaan bangunan irigasi/rawa yang telah terbangun	Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Pemeliharaan, Jaringan Irigasi, Rawa, Sungai, Pantai, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
4	Meningkatkan infrastruktur Transportasi (jalan/jembatan) yang terintegrasi dan berkualitas yang mendukung pergerakan orang, barang dan jasa	**Menjamin tetap lancar prasarana transportasi sehingga dapat melayani kebutuhan lalulintas sesuaiperkembangan** **Membangun prasarana baru dalam mengimbangi pertumbuhan lalu lintas & perkembangan wilayah** **Mewujudkan standar teknis yang dicapai secara bertahap** **Mengurangi jalan kritis yang & meningkatkan jalan tidak mantap menjadi mantap**	Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
5	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air bersih dan sanitasi	Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, penyebaran informasi, pembinaan, bim-bingan teknis pembangunan permukiman Meningkatkan peran serta, menumbuhkan prakarsa melalui paket stimulan bidang Permukiman Meningkatkan kualitas lingkungan dengan Adil dan berkelanjutan **Mewujudkan pola pemanfaatan ru-ang secara optimal,efektif& efisien**	Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik, Aparatur, Perumahan, Air Minum, Persampahan dan Limbah
6	Meningkatnya Infrastruktur Publik dan Aparatur	Memprioritaskan pengembangan desa, pusat pertumbuhan, pe-nyangga, miskin, terisolasi pada skala kawasan bertumpu pada keswadayaan masyarakat Mewujudkan pemanfaatan ruang yang serasi dan seimbang melalui penyediaan fasilitas stratejik yg	Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik, Aparatur, Perumahan, Air Minum, Persampahan dan Limbah

Sasaran		Cara Mencapai Tujuan & Sasaran	
		Kebijakan	**Program**
		mendukung sektor ekonomi, terintegrasi sesuai potensi	
7	Meningkatnya kemampuan teknologi SDM penyelenggara dan penyedia jasa konstruksi	**Meningkatkan pembinaan SDM baik kemampuan maupun Pengetahuan penyelenggaran dan penyedia jasa konstruksi.** Mengadakan Sosialisasi Peraturan Per-Undang-undangan Bidang ke-PU-an Meningkatkan pembinaan, bimbingan teknis bidang konstruksi Melaksanakan azas kemitraan dibidang jasa konstruksi Melaksanakan pengawasan atas pembinaan jasa kontruksi di daerah Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan provinsi serta kab/kota dalam bidang kePuan	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
8	Meningkatnya sarana dan prasarana dan teknologi penguji mutu konstruksi	Meningkatkan pengetahuan, keterampilan penyebaran informasi, pembinaan, bimbingan teknis bidang konstruksi	Pengembangan Teknologi dan Konstruksi
9	Meningkatnya peran dan kompetensi laboratorium pengujian konstruksi	- Menigkatkan kemampuan/kompetensi sumberdaya (manusia dan peralatan) Laboratorium Pengujian - Meningkatkan akreditasi Laboratorium Pengujian	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
10	Meningkatnya pengembangan teknologi dan informasi konstruksi	- Meningkatkan pengembangan pengkajian/penelitian teknologi konstruksi yang berdaptasi terhadap potensi lokal - Meningkatkan pelayanan informasi konstruksi	Pengembangan Teknologi dan Konstruksi

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka menunjang serta mendukung kegiatan sektor-sektor lain, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang (dari tahun 2016 s/d 2021), menyusun rencana program pembangunan sebagai berikut :

Program 1 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Kegiatan 1 Rehabilitasi /Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Kegiatan 2 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)

Program 2 Pembangunan Jalan dan Jembatan

Kegiatan 1 Pembangunan Jalan

Kegiatan 2 Pembangunan Jalan (DAK)

Kegiatan 3 Pembangunan Jembatan

Program 3 Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Kegiatan 1 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan

Kegiatan 2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

Kegiatan 3 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan (DAK)

Kegiatan 4 Peningkatan Jalan Lingkungan

Kegiatan 5 Perbaikan Jalan Lingkungan

Kegiatan 6 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan

Program 4 Penyediaan Air Minum

Kegiatan 1 Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Minum (DAK)

Kegiatan 2 Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum

Kegiatan 3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum

Kegiatan 4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Program 5 Penyediaan Sistem Air Limbah

Kegiatan 1 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah

Kegiatan 2 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK)

Kegiatan 3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah

Program 6 Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong

Kegiatan 1 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Kegiatan 2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase Lingkungan

Kegiatan 3 Pembangunan Drainase Jalan Kota

Kegiatan 4 Normalisasi Drainase Jalan Kota

Kegiatan 5 Pemeliharaan Rutin Drainase Jalan Kota

Program 7 Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Kegiatan 1 Peningkatan Pengelolaan Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya

Kegiatan 2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya

Program 8 Program Pengaturan dan Pengawasan Jasa Konstruksi

Kegiatan 1 Penyusunan/Pendataan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI)

Kegiatan 2 Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi IUJK

Program 9 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan

Kegiatan 1 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat - Alat Berat

Kegiatan 2 Pengendalian dan Uji Mutu

Program 10 Pembangunan Fasilitas Umum

Kegiatan 1 Pembangunan Fasilitas Umum

Kegiatan 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Fasilitas Umum

Program 11 Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kegiatan 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kegiatan 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kegiatan 6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan 7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan

Kegiatan 8 Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan 9 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kegiatan 10 Penyediaan Jasa Non PNS

Program 12 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan 1 Pembangunan Gedung Kantor

Kegiatan 2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Kegiatan 3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan 4 Pengadaan Mebeleur

Kegiatan 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Kegiatan 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kegiatan 7 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

Kegiatan 8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Kegiatan 9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Kegiatan 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Program 13 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan 1 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan

Kegiatan 2 Penyusunan Laporan Capian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan 3 Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset / Barang

Program 14 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Kegiatan 1 Perencanaan dan Penataan RTH

Program 15 Perencanaan Tata Ruang

Kegiatan 1 Revisi Rencana Tata Ruang

Program 16 Pemanfaatan Ruang

Kegiatan 1 Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang

Kegiatan 2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang

Kegiatan 3 Survei dan Pemetaan untuk Perencanaan Tata Ruang

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka hubungan antara Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dengan dokumen Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan sangat selaras dan saling mendukung program dan kegiatan masing - masing. Sehingga rencana pembangunan di daerah dapat saling menunjang dengan rencana pembangunan di daerah provinsi maupun di kementrian/lembaga atau rencana pembangunan pemerintah pusat.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Program – Program Kota Banjarbaru telah memiliki konsep peruntukan ruang wilayah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034.

Didalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 (Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 dinyatakan bahwa kedudukan dan fungsi rencana tata ruang wilayah daerah diantaranya adalah berkedudukan sebagai perwujudan keterpaduan dan pemerataan pembangunan di setiap wilayah. Dan berfungsi sebagai penyelaras antara kebijakan penataan ruang nasional, provinsi, daerah perbatasan dengan kebijakan penataan ruang daerah, dan juga berfungsi sebagai acuan bagi instansi pemerintah, para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pemanfaatan ruang di kota Banjarbaru.

Penataan ruang wilayah daerah bertujuan untuk mewujudkan penataan ruang daerah yang indah, damai, nyaman dan dinamis sebagai kota yang terdepan dalam pelayanan dengan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup bagi pembangunan berkelanjutan.
Didalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 (Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 dinyatakan pula mengenai strategi penataan ruang. Strategi penataan ruang diantaranya meliputi :

a. Mengembangkan jaringan jalan dalam wilayah kota Banjarbaru
b. Mengembangkan dan mengendalikan kawasan pemukiman baru pada lahan-lahan yang belum terbangun di pusat kota
c. Melakukan pengendalian dan penataan pada pusat-pusat kegiatan komersial pada jalur-jalur jalan utama
d. Mengendalikan dan melakukan penataan pada kawasan-kawasan permukiman dengan kepadatan tinggi
e. Mengembangkan dan melakukan penataan drainase dalam kota
f. Mengembangkan sistem penyediaan air bersih yang sesuai dengan kebutuhan minimal kota melalui ketersediaan air baku yang memenuhi baku mutu yang ditetapkan untuk penyediaan air dan perlindungan air baku yang dilakukan dengan keterpaduan pengaturan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Prasarana dan Sarana Sanitasi.

Didalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 (Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 dinyatakan pula mengenai strategi pengembangan dan penataan kawasan pemukiman yang meliputi :

a. Meningkatkan mutu jalan dan drainase
b. Meningkatkan ketersediaan air bersih
c. Normalisasi sungai, memelihara sumber mata air, sempadan sungai, jaringan irigasi, dan reklamasi lahan kritis
d. Memperlancar akses lalu lintas kesetiap kawasan
e. Mewujudkan penataan pertamanan yang indah di setiap kawasan
f. Pengelolaan sampah dan limbah secara bertahap
g. Peningkatan jumlah rumah yang memenuhi aspek legalitas dan layak huni

Sistem pengelolaan air limbah dinyatakan pula Didalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 (Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034. Sistem air limbah sebagaimana dimaksud didalam Perda tersebut meliputi :

a. Sistem *On-Site*, meliputi :

1. Individual

   Pada tingkat rumah tangga dilakukan dengan individual *septictank*, atau dengan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan Mandi Cuci Kakus plus plus (MCK++) bagi rumah tangga yang tidak memiliki jamban pribadi

2. Komunal

   Pada kawasan yang memungkinkan dilakukan dengan system individual setempat (tangki septic komunal)

b. Sistem *Off-Site*, meliputi :

   Penanganan limbah domestic dilakukan dengan menggunakan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), baik dalam skala kawasan atau terpusat jika memungkinkan.

Sistem Drainase juga diatur didalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 (Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034. Dinyatakan bahwa system drainase kota Banjarbaru dibagi menjadi 3 (tiga) zona prioritas, meliputi :

a. Zona Prioritas 1 (satu) atau zona prioritas utama, meliputi : Jalan Ahmad Yani Km.23 (SPBU Landasan Ulin)-Sungai Simpang Bandara Kiri 2 – Gang SMP, Jl.A. Yani-Pertigaan *Traffict Light* Loktabat, Sungai Kemuning/Besar, Sungai Basung Kecamatan Cempaka.

b. Zona Prioritas 2 (dua), meliputi : Sungai Ulin Kanan, Sungai Salak Kiri 1, Sungai Guntung Payung Hulu Kiri 1, Sungai Guntung Payung Hulu Kanan 1, Sungai Guntung Payung Hulu, Sungai Kemuning Kanan 2, Sungai Kemuning Kiri 2, Sungai Paring Kanan 1. Sungai Paring Kiri 2, Sungai Guntung Gotong Royong, Sungai Simpang Bandang Kiri 3, Sungai Simpang Bandara Kiri 1, Sungai Salak Kiri 2, Sungai Kemuning Kanan 1, Sungai Paling Kiri 1, Sungai Lurus Kiri 1, Sungai Basung Kiri, Sungai Basung Kanan, Sungai Tiung Kiri, Sungai Tiung Kanan, Sungai Paring, Sungai Mangguruh, Sungai Ampuya Kiri 1, Sungai Sambangan, Sungai Ampuya Kiri 2, Sungai Ampuya Kanan, Sungai Guntung Harapan Kiri, Sungai Salak Kanan 1, Sungai Kemuning Kiri 3.

c. Zona Prioritas 3 (tiga) meliputi : Sungai Ulin Kiri, Sungai Ulin Kanan 2, Sungai Ulin Kanan 1, Sungai Guntung Payung Kanan, Sungai Guntung Payung Hulu Kiri 3, Sungai Lurus Kiri 2, Sungai Lurus Kanan 2.

3.4.2. KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Ada dua definisi KLHS yang lazim diterapkan, yaitu definisi yang menekankan pada pendekatan telaah dampak lingkungan (*EIA-Driven*) dan pendekatan keberlanjutan (*sustainability-driven*). Pada definisi pertama, KLHS berfungsi untuk menelaah efek dan/atau dampak lingkungan dari suatu kebijakan, rencana atau program pembangunan. Sedangkan definisi kedua, menekankan pada keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya.

Definisi KLHS untuk Indonesia kemudian dirumuskan sebagai proses sistematis untuk mengevaluasi pengaruh lingkungan hidup dan menjamin diintegrasikannya prinsip – prinsip keberlanjutan dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis (*SEA is a systematic process for evaluating the envinronmental effect of and for ensuring the integration of sustainability principles into, strategic decision – making*).

Pembuatan KLHS ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Menurut Undang – undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, KLHS harus dilakukan dalam penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan jangka menengah dan panjang, kebijakan dan program yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau risiko terhadap lingkungan hidup.

Mekanisme pelaksanaan KLHS meliputi pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah, perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan dan program serta rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan dan program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. KLHS sendiri menurut ketentuan harus memuat kajian mengenai kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan ; perkiraan mengenai dampak dan risiko terhadap lingkungan hidup.

- **Peran KLHS dalam Perencanaan Tata Ruang**

KLHS adalah sebuah bentuk tindakan stratejik dalam menuntun , mengarahkan, dan menjamin tidak terjadinya efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan secara inheren dalam kebijakan, rencana dan program (KRP). Posisinya berada pada relung pengambilan keputusan. Oleh karena tidak ada mekanisme baku dalam siklus dan bentuk pengambilan keputusan dalam perencanaan tata ruang, maka manfaat KLHS bersifat khususbagi masing – masing hirarki rencana tata ruang wilayah (RTRW). KLHS bisa menentukan substansi RTRW, bisa memperkaya proses penyusunan dan evaluasi keputusan, bisa dimanfaatkan sebagai instrumen metodologis pelengkap (komplementer) atau tambahan (suplementer) dari Penjabaran RTRW, atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi – fungsi diatas.

Dengan menelaah dari KLHS diatas maka tantangan penyelenggaraan infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru ke depan juga erat terkait dengan pembangunan berkelanjutan yang menjadi bagian dari 3(tiga) pilar pembangunan (ekonomi, sosial dan lingkungan) yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Tantangan pembangunan berkelanjutan juga adalah bagaimana pembangunan fisik, sosial dan ekonomi dilakukan tanpa mengakibatkan degradasi lingkungan (menjaga kawasan dan lingkungan hunian agar tetap aman, nyaman , proaktif dan berkelanjutan).

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harusdiperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau suatu kondisi/keadaan yang apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan kapada masyarakat dalam jangka panjang

Isu – isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan

karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Isu-isu strategis tersebut menyangkut peluang dan tantangan, serta kekuatan dan kelemahan yang secara langsung maupun tidak langsung akan membatasi atau mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang dirumuskan berdasarkan Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.

Berdasarkan pada gambaran pelayanan SKPD; visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan identifikasi masalah tersebut diatas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis. Demi mewujudkan
Kota Banjarbaru menjadi Kota Pelayanan yang Berkarakter sebagaimana tertera pada Visi Pemerintah Kota Banjarbaru tahun 2016-2021, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru mengangkat beberapa isu strategis sebagai berikut :

1. Kurang optimalnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan SKPD terhadap masyarakat
2. Masih banyaknya infrastruktur perkotaan yang belum optimal
3. Masih adanya daerah rawan banjir dan genangan yang belum terselesaikan
4. Masih banyaknya infrastruktur irigasi yang belum optimal
5. Masih adanya infrastruktur publik dan aparatur yang belum terbangun dan terpelihara
6. Belum terwujudnya tertib perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten
7. Masih kurangnya luasan RTH Publik

Masalah dan isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru tersebut merupakan penjabaran beberapa masalah dan isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Banjarbaru dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.1.1. Tujuan

Tujuan adalah merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi SKPD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dalam 5 (lima) tahun kedepan yang didasarkan pada rumusan visi dan misi serta mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru tahun 2016-2021.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru tersebut, diperlukan **Tujuan** organisasi sebagai berikut :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan serta kualitas pelayanan publik
2. Meningkatkan infrastruktur jalan yang berkualitas untuk mendukung konektivitas antar wilayah
3. Mewujudkan infrastruktur air minum dan air limbah yang berkualitas dan merata
4. Menyelesaikan permasalahan banjir dan genangan
5. Meningkatkan infrastruktur jaringan irigasi untuk mendukung produksi pertanian
6. Mewujudkan sarana aparatur dan sarana publik yang berkualitas
7. Mewujudkan tertib perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten
8. Meningkatkan luasan RTH Publik

4.1.2. Sasaran Jangka Menengah SKPD

Setelah menentukan tujuan strategis, maka selanjutnya dirumuskan sasaran strategis yang ingin dicapai sebagai wujud dari proses perencanaan strategis. Tujuan utama dari penentuan sasaran adalah bagaimana mewujudkan suatu infratruktur yangmerata, aman dan handal, serta berwawasan lingkungan yang mampu memberikan nilai tambah dalam pemanfaatannya dengan menggunakan sumber daya pembiayaan dan sumber daya organisasi secara efisien, efektif dan berhasil guna.

Sasaran yang disusun diuraikan berdasarkan fungsi dan peran masing-masing bagian dalam organisasi yang ada dengan berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan untuk jangka waktu 5(lima) tahun kedepan dengan program dan kegiatan yang disusun tiap-tiap tahun anggaran. Sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru yang merupakan bagian dari proses perencanaan strategis merupakan landasan yang kuat dalam bergerak (*prime mover*) untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja organisasi serta akan memberikan jaminan terhadap keberhasilan pelaksanaan program keseluruhan bagian/satuan kerja dalam lingkup organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.

Sasaran-sasaran yang diterapkan merupakan faktor pendukung (*support factor*) pencapaian tujuan strategis yang terkait.Dengan demikian apabila seluruh sasaran strategis telah dicapai, maka diharapkan tujuan strategis terkait dengan sendirinya terealisasi sesuai yang diinginkan.

Untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru menetapkan Sasaran jangka menengah SKPD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta kualitas pelayanan publik
2. Meningkatnya infrastruktur jalan yang berkualitas untuk mendukung konektivitas antar wilayah
3. Mewujudkan infrastruktur air minum dan air limbah yang berkualitas dan merata
4. Terselesaikannya permasalahan banjir dan genangan
5. Meningkatnya infrastruktur jaringan irigasi untuk mendukung produksi pertanian
6. Terwujudnya sarana aparatur dan sarana publik yang berkualitas

7. Terwujudnya tertib perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten
8. Meningkatnya kualitas RTH Publik

Tabel 4.1.2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I.	**Tujuan:** Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan serta kualitas pelayanan publik	Terpenuhinya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						100%
I.a.	**Sasaran:** Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta kualitas pelayanan publik		Terpenuhinya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%
		Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur sesuai kebutuhan						100%
			Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%
		Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran						100%
			Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%
		Indeks kepuasan masyarakat bidang Tata Ruang						Sangat Baik (83)
			Indeks kepuasan masyarakat bidang Tata Ruang	Baik (75)	Baik (78)	Baik (80)	Sangat Baik (82)	Sangat Baik (83)

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Indeks kepuasan masyarakat bidang Pengembangan Konstruksi						Sangat Baik (83)
			Indeks kepuasan masyarakat bidang Pengembangan Konstruksi	Baik (75)	Baik (78)	Baik (80)	Sangat Baik (82)	Sangat Baik (83)
		Tersedianya layanan IUJK						100%
			Tersedianya layanan IUJK	100%	100%	100%	100%	100%
II.	**Tujuan:** Meningkatkan Infrastruktur Jalan yang berkualitas untuk mendukung konektivitas antar wilayah	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang						86,02%
II.a	**Sasaran:** Meningkatnya Infrastruktur Jalan yang berkualitas untuk mendukung konektivitas antar wilayah		Persentase panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang	67,69%	72,98%	77,60%	81,66%	86,02%
		Persentase konektivitas antar pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kota						98,90%
			Persentase konektivitas antar pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kota	95,52%	96,12%	96,94%	97,87%	98,90%
III.	**Tujuan:** Mewujudkan infrastruktur air minum dan air limbah yang berkualitas dan merata	Persentase Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan akses air minum yang aman						100%

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
III.a	**Sasaran:** Terwujudnya infrastruktur air minum dan air limbah yang berkualitas dan merata		Persentase Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan akses air minum yang aman	80,85%	88,95%	97,86%	100%	100%
		Persentase Kepala Keluarga (KK) yang terlayani sistem air limbah yang memadai						100%
			Persentase Kepala Keluarga (KK) yang terlayani sistem air limbah yang memadai	85,42%	88,06%	92,68%	96,93%	100%
IV.	**Tujuan:** Menyelesaikan permasalahan banjir dan genangan	Persentase saluran drainase yang berfungsi dengan baik						89,03%
IV.a	**Sasaran:** Terselesaikannya permasalahan banjir dan genangan		Persentase saluran drainase yang berfungsi dengan baik	87,33%	87,74%	87,72%	88,30%	89,03%
		Persentase penanganan titik rawan banjir						65,00%
			Persentase penanganan titik rawan banjir	35,00%	50,00%	55,00%	60,00%	65,00%
V.	**Tujuan:** Meningkatkan Infrastruktur Jaringan Irigasi untuk mendukung produksi pertanian	Persentase Kinerja Sistem Irigasi						77,82%
V.a.	**Sasaran:** Meningkatnya Infrastruktur Jaringan Irigasi untuk mendukung produksi pertanian		Persentase Kinerja Sistem Irigasi	64,00%	41,63%	71,94%	74,87%	77,82%

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
VI.	**Tujuan:** Mewujudkan sarana aparatur dan sarana publik yang berkualitas	Persentase sarana aparatur dalam kondisi baik						100%
VI.a	**Sasaran:** Terwujudnya sarana aparatur dan sarana publik yang berkualitas		Persentase sarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase sarana publik dalam kondisi baik						100%
			Persentase sarana publik dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%
VII.	**Tujuan:** Mewujudkan tertib perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten	Prosentase jumlah bobot dokumen teknis rencana tata ruang yang telah disusun						100%
			Prosentase jumlah bobot dokumen teknis rencana tata ruang yang telah disusun	100%	100%	100%	100%	100%
VII.a	**Sasaran:** Terwujudnya tertib perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten	Prosentase penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang						100%
			Prosentase penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang	100%	100%	100%	100%	100%
VIII.	**Tujuan:** Meningkatkan luasan RTH publik	Persentase RTH publik yang tersedia						10,29%
VIII.a	**Sasaran:** Meningkatnya kualitas RTH publik		Persentase RTH publik yang tersedia	10,25%	10,26%	10,27%	10,28%	10,29%

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategis dan Kebijakan SKPD

5.1.1. Strategi

Untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru diperlukan strategi. Strategi disusun dengan mengacu tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Adapun strategi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. *Bidang Bina Marga.*
   - Menjamin tetap lancarnya prasarana perhubungan didalam pelayanan jalan dan jembatan sehingga dapat selalu melayani kebutuhan lalu lintas sesuai volume yang terus berkembang.
   - Mengurangi jalan-jalan kota dalam kondisi rusak dan rusak berat dan berusaha meningkatkan panjang jalan kota dalam kondisi baik dan sedang.
   - Membangun jalan baru dan membuka konektivitas jalan dalam rangka mengimbangi pertumbuhan lalu lintas dan perkembangan wilayah.
2. *Bidang Cipta Karya*.
   - Meningkatkan akses air minum yang aman.
   - Meningkatkan akses sanitasi yang bersih dan sehat.
   - Meningkatkan jalan lingkungan perumahan dan permukiman.
   - Mendukung peningkatan sarana publik dan pemerintahan yang dikaitkan dengan upaya perwujudan fungsi-fungsi kota sebagai pusat kegiatan.
3. *Bidang Sumber Daya Air*
   - Mempertahankan dan mengoptimalkan pelayanan prasarana dan sarana irigasi yang telah dibangun
   - Meminimalkan dampak akibat daya rusak air

4. *Bidang Pembinaan Konstruksi*
   - Melaksanakan pembinaan penyelenggara dan penyedia jasa konstruksi yang seirama dengan kebijakan nasional bidang jasa konstruksi.
   - Terlaksananya pembinaan jasa konstruksi di daerah.
   - Mengembangkan prakarsa koordinasi antara penyelenggara dan penyedia jasa konstruksi.
5. *Bidang Tata Ruang*
   - Meningkatkan dan menjaga luasan Ruang Terbuka Hijau kawasan perkotaan.
   - Penyelenggaraan, perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan pembinaan di bidang penataan ruang

5.1.2. Kebijakan SKPD

Kebijakan merupakan arah/tindakan yang harus dipedomani SKPD, dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Renstra SKPD. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru , menetapkan kebijakan SKPD untuk mencapai tujuannya, yaitu dengan :

1. Melakukan pembebasan lahan melalui partisipasi masyarakat dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penyuluhan, sosialisasi program-program pembangunan
2. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas / Instansi terkait dalam pelaksanaan Program Pembangunan Daerah.
3. Meningkatkan jalan kota dalam kondisi baik dan sedang.
4. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase yang berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan sosialiasi kepada masyarakat tentang pentingnya sanitasi.
6. Meningkatkan Kerjasama dan penyertaan modal dalam pipanisasi.
7. Meningkatkan akses air minum yang aman dan sanitasi yang bersih dan sehat tanpa mengesampingkan kelestarian sumber daya alam dan keserasian lingkungan hidup.
8. Mempertahankan & mengoptimalkan pemberdayaan bangunan irigasi yang telah terbangun.
9. Mengadakan Sosialisasi Peraturan Per-Undang-undangan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

10. Meningkatkan pembinaan, bimbingan teknis bidang konstruksi
11. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan provinsi serta kab/kota dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
12. Meningkatkan pembangunan infrastruktur publik dan pemerintahan yang merata, aman, dan bewawasan lingkungan.
13. Meningkatkan dan menjaga luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai ketentuan.
14. Penyelenggaraan pelayanan publik di bidang tata ruang.
15. Penyusunan rencana tata ruang beserta revisinya.
16. Penyelenggaraan pengawasan, pembinaan serta pengendalian pemanfaatan ruang.

Tabel 5.1.2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

V I S I **" MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG MERATA, DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN"**			
MISI 1	Meningkatkan akuntabilitas dan pelayanan publik		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan serta kualitas pelayanan publik	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta kualitas pelayanan publik	2. Meningkatkan Nilai AKIP	1. Meningkatkan Nilai AKIP menjadi B
		3. Meningkatkan akuntabilitas pelaporan administrasi dan keuangan	2. Melaksanakan tata kelola administrasi dan keuangan yang akuntable
		4. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat	3. Melaksanakan pelayanan yang berkualitas sesuai SOP
MISI 2	Mewujudkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan infrastruktur jalan yang berkualitas	1. Meningkatnya infrastruktur jalan yang berkualitas	1. Meningkatkan dan mempertahankan	1. Melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan jalan

untuk mendukung konektivitas antar wilayah	untuk mendukung konektivitas antar wilayah	kualitas jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan sedang	dan jembatan 2. Menjaga kualitas sarana dan prasarana alat-alat berat 3. Melaksanakan pengawasan terhadap kualitas dan kuantitas pekerjaan konstruksi
2. Mewujudkan infrastruktur air minum dan air limbah yang berkualitas dan merata	2. Terwujudnya infrastruktur air minum dan air limbah yang berkualitas dan merata	2. Penyediaan infrastruktur air minum dan air limbah yang berkualitas	4. Melaksanakan pembangunan pipa jaringan air minum dan MCK
MISI 3	Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Menyelesaikan permasalahan banjir dan genangan	1. Terselesaikannya permasalahan banjir dan genangan	1. Meningkatkan sistem jaringan Drainase dalam kondisi baik	1. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase
		2. Mengendalikan daya rusak air	2. Melaksanakan penanganan terhadap titik rawan banjir 3. Melaksanakan pembangunan embung
2. Meningkatkan infrastruktur jaringan irigasi untuk mendukung produksi pertanian	2. Meningkatnya infrastruktur jaringan irigasi untuk mendukung produksi pertanian	3. Meningkatkan dan mempertahankan jaringan irigasi agar dapat menyediakan air irigasi 1,2 liter per detik	4. Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi

MISI 4	Meningkatkan infrastruktur publik dan aparatur		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Mewujudkan sarana aparatur dan sarana publik yang berkualitas	1. Terwujudnya sarana aparatur dan sarana publik yang berkualitas	1. Penyediaan sarana aparatur dalam kondisi baik	1. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan berkala gedung kantor
			2. Melaksanakan pemeliharaan berkala rumah dinas
MISI 5	Meningkatkan penataan ruang yang berkelanjutan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Mewujudkan tertib perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten	1. Terwujudnya tertib perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten	1. Penyediaan informasi mengenai tata ruang	1. Melaksanakan penyusunan dan revisi rencana tata ruang
		2. Mengendalikan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang	2. Melaksanakan evaluasi terhadap izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan
2. Meningkatkan luasan RTH Publik	2. Meningkatnya kualitas RTH Publik	3. Penyediaan luasan RTH publik minimal 20% dari luas wilayah	3. Melaksanakan penyediaan luasan RTH publik

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Dalam program ini diuraikan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu guna mencapai visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjabaru yang telah ditetapkan.Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Program tersebut diatas adalah **Program SKPD** yang merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, yang akan dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD.

Sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.Selain itu **Kegiatan** juga merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang / jasa.

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan / atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan / atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Kinerja adalah keluaran / hasil dari kegiatan / program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Sasaran dalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2016 – 2021 memiliki program dan kegiatan yang telah ditetap sesuai RPJMD Kota Banjarbaru adalah seperti yang ditunjukkan dalam Tabel-Tabel terlampir.

Tabel 6.1.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Banjarbaru

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Awal (2021)	
						Tahun-1 (2016)		Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Program 1 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**Cakupan laporan kinerja dan keuangan**	**100%**	**100%**	**83,000,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Persentase tertib administrasi barang/aset	**100%**	**100%**	**14,000,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD	100%	100%	25,520,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 2 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Tersusunnya laporan keuangan yang akrual	100%	100%	57,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 3 Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang	Tersusunnya laporan Aset SKPD	100%	100%	14,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan serta kualitas pelayanan publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta kualitas pelayanan publik	Nilai evaluasi AKIP SKPD	**Program 1 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Nilai evaluasi AKIP SKPD**	-	-	-	B	**82,458,150.00**	B	**94,279,500.00**	BB	**105,964,895.00**	BB	**107,964,895.00**	A	**109,964,895.00**	A	**109,964,895.00**
			Kegiatan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai evaluasi AKIP SKPD	-	-	-	B	15,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	Kegiatan 2 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	-	-	-	100.00%	52,958,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 3 Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang	Prosentase aset/barang pemerintah yang tercatat	-	-	-	100.00%	13,999,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan tepat waktu	-	-	-	-	-	6 dokumen	40,000,000.00	5 dokumen	42,000,000.00	5 dokumen	44,000,000.00	5 dokumen	46,000,000.00	6 dokumen	46,000,000.00	6 dokumen	46,000,000.00
			Kegiatan 2 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan tepat waktu	-	-	-	-	-	1 dokumen	40,979,600.00	1 dokumen	50,000,000.00	1 dokumen	50,000,000.00	1 dokumen	50,000,000.00	1 dokumen	50,000,000.00	1 dokumen	50,000,000.00
				Waktu penyelesaian SPM dinyatakan lengkap dan sah tepat waktu	-	-	-	-	-	1 hari		1 hari		1 hari		1 hari		1 hari		1 hari	
			Kegiatan 3 Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang	Kesesuaian BMD Dinas PUPR Kota Banjarbaru dengan neraca aset	-	-	-	-	-	100.00%	13,299,900.00	100.00%	13,964,895.00	100.00%	13,964,895.00	100.00%	13,964,895.00	100.00%	13,964,895.00	100.00%	13,964,895.00
				Jumlah Laporan Inventaris Barang tepat waktu	-	-	-	-	-	1 dokumen	-	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	
			Program 2 Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**100.00%**	**100.00%**	**834,791,550.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Awal (2021)	
						Tahun-1 (2016)		Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Kegiatan 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 bulan	12 bulan	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya pembayaran listrik, telepon/internet serta PDAM	12 bulan	12 bulan	97,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	19,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	14,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	11,999,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Tersedianya bahan bacaan	12 bulan	12 bulan	4,992,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 7 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	12 bulan	12 bulan	89,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 8 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi keluar daerah	12 bulan	12 bulan	283,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 9 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 10 Penyediaan Jasa Non PNS	Tersedianya biaya penyediaan jasa non PNS	12 bulan	12 bulan	283,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Indeks kepuasan pelayanan internal	**Program 2 Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Indeks Kepuasan Internal**	-	-	-	**Baik (75)**	**1,139,233,050.00**	**Baik (78)**	**1,088,653,250.00**	**Baik (80)**	**1,143,085,912.50**	**Sangat Baik (82)**	**1,200,240,208.13**	**Sangat Baik (83)**	**1,260,252,218.53**	**Sangat Baik (83)**	**1,260,252,218.53**
			Kegiatan 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase tersedianya surat menyurat	-	-	-	100.00%	1,998,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	-	-	-	100.00%	97,800,000.00	100.00%	161,400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	169,470,000.00	12 bulan	177,943,500.00	12 bulan	186,840,675.00	12 bulan	186,840,675.00
			Kegiatan 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prosentase tersedianya alat tulis kantor	-	-	-	100.00%	19,000,000.00	100.00%	14,245,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	14,957,565.00	12 bulan	15,705,443.25	12 bulan	16,490,715.41	12 bulan	16,490,715.41
			Kegiatan 4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Prosentase tersedianya barang cetak dan penggandaan	-	-	-	100.00%	14,000,000.00	100.00%	11,398,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	11,967,900.00	12 bulan	12,566,295.00	12 bulan	13,194,609.75	12 bulan	13,194,609.75

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Awal (2021)	
						Tahun-1 (2016)		Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Kegiatan 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	-	100.00%	11,999,550.00	100.00%	11,574,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat listrik, alat kebersihan, dan bahan pembersih	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	12,153,487.50	12 bulan	12,761,161.88	12 bulan	13,399,219.97	12 bulan	13,399,219.97
			Kegiatan 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Prosentase tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	-	-	100.00%	4,992,000.00	100.00%	6,240,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	6,552,000.00	12 bulan	6,879,600.00	12 bulan	7,223,580.00	12 bulan	7,223,580.00
			Kegiatan 7 Penyediaan Makanan dan Minuman	Prosentase tersedianya makanan dan minuman rapat dan pegawai	-	-	-	100.00%	184,603,500.00	100.00%	175,372,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 7 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum harian pegawai, rapat dan tamu	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	184,141,125.00	12 bulan	193,348,181.25	12 bulan	203,015,590.31	12 bulan	203,015,590.31
			Kegiatan 8 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Prosentase terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	-	-	100.00%	450,000,000.00	100.00%	226,022,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 8 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	237,323,835.00	12 bulan	249,190,026.75	12 bulan	261,649,528.09	12 bulan	261,649,528.09
			Kegiatan 9 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Prosentase tersedianya jasa kebersihan	-	-	-	100.00%	30,000,000.00	100.00%	42,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 9 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	-	-	-	-	-	-	-	4 orang	44,100,000.00	4 orang	46,305,000.00	4 orang	48,620,250.00	4 orang	48,620,250.00
			Kegiatan 10 Penyediaan Jasa Non PNS	Prosentase tersedianya jasa non PNS	-	-	-	100.00%	324,840,000.00	100.00%	440,400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 10 Penyediaan Jasa Non PNS	Tersedianya jasa non PNS	-	-	-	-	-	-	-	27 orang	462,420,000.00	27 orang	485,541,000.00	27 orang	509,818,050.00	27 orang	509,818,050.00
			Program 3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja aparatur dinas**	**100.00%**	**100.00%**	**314,000,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan untuk gedung kantor	15 buah	10 buah	31,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan kantor	10 buah	8 buah	46,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 3 Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur	17 buah	15 buah	22,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Awal (2021)	
						Tahun-1 (2016)		Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Kegiatan 4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan	12 bulan	12 bulan	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	12 bulan	12 bulan	172,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya barang perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	12 bulan	12 bulan	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Persentasi keluhan pengaduan layanan Internal yang ditindak lanjuti	**Program 3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur**	-	-	-	**100.00%**	**589,778,000.00**	**100.00%**	**623,010,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Prosentase tersedianya perlengkapan gedung kantor				100.00%	73,510,000.00	100.00%	51,020,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Prosentase tersedianya peralatan gedung kantor	-	-	-	100.00%	232,220,000.00	100.00%	241,470,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 3 Pengadaan Mebeleur	Prosentase tersedianya mebeleur kantor	-	-	-	100.00%	38,250,000.00	100.00%	67,070,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Prosentase terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	-	-	-	100.00%	32,000,000.00	100.00%	30,400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Prosentase terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	-	-	-	100.00%	196,798,000.00	100.00%	213,450,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Prosentase terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-	-	-	100.00%	7,000,000.00	100.00%	8,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Prosentase terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	-	-	100.00%	10,000,000.00	100.00%	11,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			Program 3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik**	-	-	-	-	-	-	-	**100.00%**	**654,160,500.00**	**100.00%**	**686,868,525.00**	**100.00%**	**721,211,951.25**	**100.00%**	**721,211,951.25**
			Kegiatan 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	-	-	-	-	-	-	-	4 jenis	53,571,000.00	4 jenis	56,249,550.00	4 jenis	59,062,027.50	4 jenis	59,062,027.50
			Kegiatan 2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	-	-	-	-	-	-	-	3 jenis	253,543,500.00	3 jenis	266,220,675.00	3 jenis	279,531,708.75	3 jenis	279,531,708.75

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Awal (2021)	
						Tahun-1 (2016)		Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Kegiatan 3 Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur dalam kondisi baik	-	-	-	-	-	-	-	4 jenis	70,423,500.00	4 jenis	73,944,675.00	4 jenis	77,641,908.75	4 jenis	77,641,908.75
			Kegiatan 4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan dalam kondisi baik	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	31,920,000.00	1 unit	33,516,000.00	1 unit	35,191,800.00	1 unit	35,191,800.00
			Kegiatan 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	-	-	-	-	-	-	-	15 unit	224,122,500.00	15 unit	235,328,625.00	15 unit	247,095,056.25	15 unit	247,095,056.25
			Kegiatan 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	-	-	-	-	-	-	-	3 jenis	9,030,000.00	3 jenis	9,481,500.00	3 jenis	9,955,575.00	3 jenis	9,955,575.00
			Kegiatan 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	-	-	-	-	-	-	-	2 jenis	11,550,000.00	2 jenis	12,127,500.00	2 jenis	12,733,875.00	2 jenis	12,733,875.00
		Indeks kepuasan masyarakat bidang Tata Ruang	**Program 4 Pemanfaatan Ruang**	**Indeks kepuasan masyarakat di bidang tata ruang**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**Baik (75)**	**357,060,000.00**	**Baik (78)**	**339,206,900.00**	**Baik (80)**	**352,132,000.00**	**Sangat Baik (82)**	**365,584,000.00**	**Sangat Baik (83)**	**379,584,000.00**	**Sangat Baik (83)**	**379,584,000.00**
			Kegiatan 1 Penyusunan Kebijakan Pemanfaatan Ruang	Persentase jumlah izin pemanfaatan ruang (IPPT) yang terselesaikan sesuai dengan	83%	N/A	N/A	100%	144,775,000.00	100%	137,536,100.00	100%	144,412,000.00	100%	151,633,000.00	100%	159,215,000.00	100%	159,215,000.00
			Kegiatan 2 Survey dan Pemetaan Untuk Perencanaan Ruang	Prosentase jumlah survey yang dilaksanakan sesuai dengan SOP	100%	N/A	N/A	100%	212,285,000.00	100%	201,670,800.00	100%	207,720,000.00	100%	213,951,000.00	100%	220,369,000.00	100%	220,369,000.00
		Indeks kepuasan masyarakat bidang Pengembangan Konstruksi	**Program 5 Program Pengaturan dan pengawasan jasa konstruksi**	**Indeks kepuasan masyarakat di bidang pengembangan konstruksi**	-	-	-	**Baik (75)**	**19,999,900.00**	**Baik (78)**	**22,000,000.00**	**Baik (80)**	**24,200,000.00**	**Sangat Baik (82)**	**26,620,000.00**	**Sangat Baik (83)**	**29,282,000.00**	**Sangat Baik (83)**	**29,282,000.00**
				Persentase layanan yang sesuai dengan bobot layanan jenis informasi jasa konstruksi menurut SPM PU	-	-	-	**100.00%**	**45,000,000.00**	**100.00%**	**49,500,000.00**	**100.00%**	**54,450,000.00**	**100.00%**	**59,895,000.00**	**100.00%**	**65,884,000.00**	**100.00%**	**65,884,000.00**
			Kegiatan 1 Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi IUJK	Persetase jumlah rekomendasi teknis IUJK yang terselesaikan sesuai dengan SOP	-	-	-	100.00%	19,999,900.00	100.00%	18,999,800.00	100.00%	24,200,000.00	100.00%	26,620,000.00	100.00%	29,282,000.00	100.00%	29,282,000.00
		Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Kegiatan 2 Penyusunan Pendataan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	Jumlah layanan yang sesuai dengan bobot informasi jasa konstruksi yang ditetapkan dalam SPM PU	-	-	-	7 Layanan	45,000,000.00	7 Layanan	42,466,400.00	7 Layanan	54,450,000.00	7 Layanan	59,895,000.00	7 Layanan	65,884,000.00	7 Layanan	65,884,000.00
			Program 6 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	**Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang**	**85%**	**85.90%**	**74,052,000,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Awal (2021)	
						Tahun-1 (2016)		Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Panjang Jalan Lingkungan Dalam Kondisi Baik	**95,901 m'**	**16,281 m'**	**48,231,000,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Panjang jalan yang dipelihara	14.431 m'	13.708 m'	16,666,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK)	Panjang jalan yang dipelihara	26.130 m'	25.765 m'	56,011,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Pendamping)	Panjang jalan yang dipelihara			468,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 4 Pemeliharaan Rutin Drainase Jalan Kota	Berkurangnya panjang drainase jalan dalam kondisi rusak sedang yang	143.750 m'	3,290 m'	2,721,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningkatkan Infrastruktur Jalan yang berkualitas untuk mendukung konektivitas antar wilayah	Meningkatnya Infrastruktur Jalan yang berkualitas untuk mendukung konektivitas antar wilayah	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang	**Program 6 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**	**Persentase tingkat jalan kota dalam kondisi baik dan sedang**	-	-	-	**84.68%**	**29,794,171,824.00**	**84.86%**	**24,018,882,436.00**	**85.09%**	**26,242,697,510.00**	**85.36%**	**27,920,793,690.00**	**85.66%**	**29,701,056,730.00**	**85.66%**	################
				Persentase tingkat kondisi jalan lingkungan yang baik dan sedang	-	-	-	**49,66%**	**56,452,499,500.00**	**60,38%**	**40,644,741,900.00**	**69,06%**	**47,423,000,000.00**	**77,73%**	**47,423,000,000.00**	**86,41%**	**47,423,000,000.00**	**86,41%**	################
			Kegiatan 1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Panjang jalan kota dan jembatan yang dipelihara	453.792 m	-	-	8.604 m	12,306,499,508.00	7.899 m	13,109,878,804.00	8.099 m	14,113,907,320.00	8.299 m	15,185,563,980.00	8.499 m	16,329,101,540.00	8.499 m	################
			Kegiatan 2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK)		453.792 m	-	-	5.788 m	10,457,172,846.00	2.745 m	6,504,686,400.00	2.745 m	6,829,920,720.00	2.745 m	7,171,416,760.00	2.745 m	7,529,987,600.00	2.745 m	7,529,987,600.00
			Kegiatan 3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan		453.792 m	-	-	23 m	3,957,999,990.00	6 m	765,363,500.00	10 m	1,339,386,130.00	10 m	1,406,355,440.00	10 m	1,476,637,210.00	10 m	1,476,637,210.00
			Kegiatan 4 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan		453.792 m	-	-	2.028 m	3,072,499,480.00	2.123 m	3,638,953,732.00	2.200 m	3,959,483,340.00	2.200 m	4,157,457,510.00	2.200 m	4,365,330,380.00	2.200 m	4,365,330,380.00
			Kegiatan 5 Peningkatan Jalan Lingkungan	Panjang peningkatan jalan lingkungan yang dilaksanakan	191.237m	-	-	65.520 m	53,709,369,000.00	44055 m	38,288,768,000.00	50.000 m	43,324,000,000.00	50.000 m	43,324,000,000.00	50.000 m	43,324,000,000.00	50.000 m	################
			Kegiatan 6 Perbaikan Jalan Lingkungan	Panjang perbaikan jalan lingkungan yang dilaksanakan	191.237m	-	-	3.282 m	2,743,130,500.00	3.110m	2,355,973,900.00	5.000 m	4,099,000,000.00	5.000 m	4,099,000,000.00	5.000 m	4,099,000,000.00	5.000 m	4,099,000,000.00
			Program 7 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	**Pemeliharaan alat berat secara berkala**	**100.00%**	**100.00%**	**208,000,000.00**												
				Pengendalian pelaksanaan kegiatan terhadap kualitas dan kuantitas	**200 paket**	**30 paket**	**42,000,000.00**												

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Awal (2021)	
						Tahun-1 (2016)		Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar/persentase tersedianya 7 (tujuh) jenis sistem informasi jasa konstruksi	**70.00%**	**70.00%**	**70,000,000.00**													
			Kegiatan 1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat	Terpeliharanya alat-alat berat	5 unit	5 unit	208,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 2 Pengendalian dan Uji Mutu	Terkendalinya pelaksanaan kegiatan terhadap kualitas dan kuantitas pekerjaan	200 paket	30 paket	56,537,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Program 7 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	**Persentase alat berat dalam kondisi baik**	-	-	-	**100.00%**	**232,863,115.00**	**100.00%**	**207,480,950.00**	**100.00%**	**228,229,000.00**	**100.00%**	**251,051,900.00**	**100.00%**	**276,158,000.00**	**100.00%**	**276,158,000.00**
			Kegiatan 1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat	Jumlah alat berat dalam kondisi baik	-	-	-	4 Unit	232,863,115.00	4 Unit	207,480,950.00	4 Unit	228,229,000.00	4 Unit	251,051,900.00	4 Unit	276,158,000.00	4 Unit	276,158,000.00
			Program 8 Pengaturan dan pengawasan jasa konstruksi	**Persentase paket pekerjaan yang terawasi kualitas dan kuantitas**	-	-	-	**100.00%**	**56,537,350.00**	**100.00%**	**36,637,133.00**	**100.00%**	**40,300,000.00**	**100.00%**	**44,330,000.00**	**100.00%**	**48,763,000.00**	**100.00%**	**48,763,000.00**
			Kegiatan 1 Pengendalian dan Uji Mutu	Jumlah paket pekerjaan yang dilakukan uji	-	-	-	100%	56,537,350.00	100%	36,637,133.00	100%	40,300,000.00	100%	44,330,000.00	100%	48,763,000.00	100%	48,763,000.00
		Persentase konektivitas antar pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kota	**Program 9 Pembangunan Jalan dan Jembatan**	**Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kota**	**95.33%**	**95.52%**	**67,614,000,000.00**	**95.52%**	**34,600,301,245.00**	**96.12%**	**33,816,848,380.00**	**96.94%**	**39,323,737,233.33**	**97.87%**	**41,289,924,035.00**	**98.90%**	**43,354,420,131.75**	**98.90%**	**##########**
				Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2	**41,21%**	**43,15%**	**26,484,000,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 1 Pembangunan Jalan	Panjang jalan kota yang dibangun	515.175 km	2.01 km	12,878,000,000.00	6.515 m	15,730,503,175.00	6.456 m	23,725,664,980.00	6.640 m	24,911,948,200.00	6.830 m	26,157,545,600.00	7.040 m	27,465,422,800.00	7.040 m	##########
			Kegiatan 2 Pembangunan Jalan (DAK)		515.175 km	4.02 km	51,899,000,000.00	1.010 m	8,957,298,200.00	2.503 m	9,230,048,600.00	2.570 m	9,691,551,000.00	2.650 m	10,176,128,500.00	2.730 m	10,684,934,900.00	2.730 m	##########
			Kegiatan 3 Pembangunan Jalan (Pendamping)		515.175 km		488,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 4 Pembangunan Jembatan		515.175 km	464 km	2,349,000,000.00	42 m	9,912,499,870.00	10 m	861,134,800.00	20 m	4,720,238,033.33	20 m	4,956,249,935.00	20 m	5,204,062,431.75	20 m	5,204,062,431.75

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Awal (2021)	
						Tahun-1 (2016)		Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Kegiatan 5 Pembangunan Drainase Jalan Kota	Bertambahnya panjang jalan yang memiliki drainase	250.11 km	4.98 km	13,449,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 6 Normalisasi Drainase Jalan Kota	Berkurangnya panjang drainase jalan dalam kondisi rusak berat	37.80 km	4.30 km	13,035,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Program 10 Penyediaan Air minum	**Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman**	**73.56%**	**75.17%**	**26,420,000,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 1 Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum	Sarana dan Prasarana Air Minum Terpelihara	382,286 m'	6,492 m'	1,100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Perencanaan dan pengendalian program	1 program	1 program	20,123,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mewujudkan infrastruktur air minum dan air limbah yang berkualitas dan merata	Terwujudnya infrastruktur air minum dan air limbah yang berkualitas dan merata	Persentase Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan akses air minum yang aman	**Program 10 Penyediaan Air minum**	**Persentase Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan akses air minum yang aman**	-	-	-	**80.85%**	**10,071,346,200.00**	**88.95%**	**12,451,682,600.00**	**97.86%**	**8,117,085,380.00**	**100.00%**	**6,044,348,974.00**	**100.00%**	**3,878,995,555.33**	**100.00%**	**3,878,995,555.33**
			Kegiatan 1 Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Minum (DAK)	Sarana dan Prasarana Air Minum Terbangun	382,286 m'	29,450 m'	20,000,000,000.00	8,550 m	3,806,949,000.00	8,519 m	9,013,057,000.00	4,097 m	4,506,528,500.00	2,048 m	2,253,264,250.00	1,024 m	1,126,623,125.00	1,024 m	1,126,623,125.00
			Kegiatan 2 Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Minum (Pendamping)				500,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 3 Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum		382,286 m'	19,603 m'	4,800,000,000.00	18.210,43 m'	4,529,149,200.00	3,980 m	2,025,589,000.00	1,934 m	2,126,868,450.00	2,030 m	2,233,211,872.50	1,015 m	1,116,605,936.25	1,015 m	1,116,605,936.25
			Kegiatan 4 Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum	Sarana dan Prasarana Air Minum Terbangun	382,286 m'	6,700 m	1,735,248,000.00	9,850 m	1,735,248,000.00	5.565 m	1,413,036,600.00	1.349 m	1,483,688,430.00	1.416 m	1,557,872,851.50	1.487 m	1,635,766,494.08	1.487 m	1,635,766,494.08
			Program 11 Penyediaan Sistem Air Limbah	**Persentase Penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai**	**82.68%**	84.95%	3,100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase Kepala Keluarga (KK) yang terlayani sistem air limbah yang memadai	**Program 11 Penyediaan Sistem Air Limbah**	**Persentase Kepala Keluarga (KK) yang terlayani sistem air limbah yang memadai**	-	-	-	**85.42%**	**4,319,980,000.00**	**88.06%**	**10,139,086,000.00**	**92.68%**	**10,671,040,300.00**	**96.93%**	**4,663,750,402.50**	**100.00%**	**2,934,685,348.88**	**100.00%**	**2,934,685,348.88**
			Kegiatan 1 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK)	Sarana dan Prasarana Air Limbah Terbangun	61 unit	5 Unit	1,200,000,000.00	58 Unit	2,192,900,000.00	30 Unit	8,305,831,000.00	30 Unit	8,721,122,550.00	40 Unit	2,616,336,765.00	40 Unit	784,901,029.50	40 Unit	784,901,029.50
			Kegiatan 2 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (Pendamping)				100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 3 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah		61 unit	6 Unit	1,218,360,000.00	6 Unit	1,218,360,000.00	173 Unit	1,333,255,000.00	193 Unit	1,399,917,750.00	162 Unit	1,469,913,637.50	183 Unit	1,543,409,319.38	183 Unit	1,543,409,319.38

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Awal (2021)	
						Tahun-1 (2016)		Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Kegiatan 4 Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah		61 unit	3 unit	500,000,000.00	64 Unit	908,720,000.00	11 Unit	500,000,000.00	12 Unit	550,000,000.00	13 Unit	577,500,000.00	14 Unit	606,375,000.00	14 Unit	606,375,000.00
			Program 12 Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong	**Persentase saluran drainase lingkungan yang berfungsi dengan baik**	38.00%	40.00%	11,500,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Menyelesaikan permasalahan banjir dan genangan	Terselesaikannya permasalahan banjir dan genangan	Persentase saluran drainase yang berfungsi dengan baik	**Program 12 Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong**	**Persentase saluran drainase kota yang berfungsi dengan baik**	-	-	-	**88.62%**	**27,663,658,550.00**	**90.13%**	**22,422,335,000.00**	**91.61%**	**23,543,451,600.00**	**93.06%**	**24,720,624,100.00**	**94.48%**	**25,956,655,200.00**	**94.48%**	##################
				Persentase saluran drainase lingkungan yang berfungsi dengan baik	-	-	-	**79.40%**	**12,558,332,200.00**	**76.65%**	**12,430,415,400.00**	**73.56%**	**14,294,977,710.00**	**73.95%**	**17,010,771,020.00**	**75.23%**	**21,263,463,775.00**	**75.23%**	##################
			Kegiatan 1 Pembangunan Drainase Jalan Kota	Panjang drainase yang berfungsi dengan baik	-	-	-	3.580 m	7,312,599,250.00	3.117 m	6,946,969,200.00	4.200 m	7,294,317,600.00	4.200 m	7,659,033,400.00	4.500 m	8,041,985,000.00	4.500 m	8,041,985,000.00
			Kegiatan 2 Normalisasi Drainase Jalan Kota		-	-	-	3.125 m	17,545,099,400.00	3.366 m	12,578,973,400.00	3.500 m	13,207,922,000.00	3.500 m	13,868,318,100.00	4.000 m	14,561,734,000.00	4.000 m	##################
			Kegiatan 3 Pemeliharaan Rutin Drainase Jalan Kota		-	-	-	3.335 m	2,805,959,900.00	3.235 m	2,896,392,400.00	3.500 m	3,041,212,000.00	3.600 m	3,193,272,600.00	3.600 m	3,352,936,200.00	3.600 m	3,352,936,200.00
			Kegaiatn 4 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Panjang drainase lingkungan yang dibangun	22.437,18 m	8.306 m	8,663,433,600.00	8.306 m	8,663,433,600.00	7.950 m	9,939,941,800.00	9.145 m	11,430,933,070.00	10.974 m	13,717,119,684.00	13.717 m	17,146,399,605.00	13.717 m	##################
			Kegiatan 5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase Lingkungan	Panjang drainase lingkungan yang terpelihara	22.437,18 m	3.710,12 m	3,894,898,600.00	5.092,75 m	3,894,898,600.00	2.351 m	2,490,473,600.00	2.291 m	2,864,044,640.00	2.635 m	3,293,651,336.00	3.294 m	4,117,064,170.00	3.294 m	4,117,064,170.00
			Program 13 Pengendalian Banjir	**Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kawasan sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 3 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali**	**83.35%**	**85.00%**	**17,906,000,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 1 Pengembangan Pengelolaan Daerah Rawa dalam Rangka Pengendalian Banjir	Luas Daerah Genangan Berkurang	31.56 Ha	28.40 Ha	17,906,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase penanganan titik rawan banjir	**Program 13 Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya**	**Persentase penanganan titik rawan banjir**	-	-	-	**35.00%**	**16,520,329,000.00**	**50.00%**	**11,661,437,400.00**	**55.00%**	**7,519,509,270.00**	**60.00%**	**7,895,484,733.00**	**65.00%**	**8,290,258,969.00**	**65.00%**	**8,290,258,969.00**
			Kegiatan 1 Peningkatan Pengelolaan Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya	Panjang sungai dan sumber daya air lainnya yang tertangani	34.074 m'	-	-	2.950 m	10,259,673,200.00	5.350 m	8,563,814,400.00	5.600 m	4,267,005,120.00	5.800 m	4,480,355,376.00	6.000 m	4,704,373,144.00	6.000 m	4,704,373,144.00

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Awal (2021)	
						Tahun-1 (2016)		Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Kegaiatan 2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya	Panjang sungai dan Sumber Daya Air lainnya yang terpelihara	34.074 m'	-	-	5.500 m	6,260,655,800.00	4.000 m	3,097,623,000.00	4.200 m	3,252,504,150.00	4.400 m	3,415,129,357.00	4.600 m	3,585,885,825.00	4.600 m	3,585,885,825.00
			Program 14 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, & Jaringan Pengairan Lainnya	**Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya**	**61.00%**	**64.00%**	**12,839,346,996.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	Infrastruktur jaringan irigasi yang berfungsi	62,341 m	69,341 m'	36,156,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Infrastruktur jaringan irigasi yang berfungsi	4,706 Ha	4,800 Ha	1,510,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai	Jaringan infrastruktur dan jaringan irigasi yang berfungsi	47,715 m'	48,669 m'	3,682,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningkatkan Infrastruktur Jaringan Irigasi untuk mendukung produksi pertanian	Meningkatnya Infrastruktur Jaringan Irigasi untuk mendukung produksi pertanian	Persentase Kinerja Sistem Irigasi	**Program 14 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, & Jaringan Pengairan Lainnya**	**Persentase Kinerja Sistem Irigasi**	**-**	**-**	**-**	**64.00%**	**12,839,346,996.00**	**41.63%**	**6,924,544,020.00**	**71.94%**	**16,950,000,000.00**	**74.87%**	**16,950,000,000.00**	**77.82%**	################	**77.82%**	################
			Kegiatan 1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	Panjang jaringan irigasi yang berfungsi	-	-	-	2.454 m	7,779,147,996.00	5.639 m	4,745,385,000.00	2.478 m	15,440,000,000.00	2.599 m	15,440,000,000.00	2.625 m	15,440,000,000.00	2.625 m	################
			Kegiatan 2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Luas daerah irigasi yang teraliri	-	-	-	400 Ha	5,060,199,000.00	368 Ha	2,179,159,020.00	158,82 Ha	1,510,000,000.00	166,52 Ha	1,510,000,000.00	168,22 Ha	1,510,000,000.00	168,22 Ha	1,510,000,000.00
			Program 15 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur**	**5 unit**	**8 unit**	**124,439,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 1 Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan gedung kantor	2 unit	4 unit	123,446,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor terpelihara	1 unit	2 unit	696,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Pemeliharaan rutin rumah dinas	2 unit	100%	300,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mewujudkan sarana aparatur dan sarana publik yang berkualitas	Terwujudnya sarana aparatur dan sarana publik yang berkualitas	Persentase sarana aparatur dalam kondisi baik	**Program 15 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase sarana aparatur dalam kondisi baik**				**100.00%**	**10,338,974,815.00**	**100.00%**	**5,764,699,500.00**	**100.00%**	**3,867,750,000.00**	**100.00%**	**3,867,750,000.00**	**100.00%**	**3,867,750,000.00**	**100.00%**	**3,867,750,000.00**
			Kegiatan 1 Pembangunan Gedung Kantor	Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	-	-	-	100%	6,467,070,000.00	100%	4,657,220,000.00	100%	3,040,830,000.00	100%	3,040,830,000.00	100%	3,040,830,000.00	100%	3,040,830,000.00
			Kegiatan 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		-	-	-	100%	3,571,904,815.00	100%	822,479,500.00	100%	413,460,000.00	100%	413,460,000.00	100%	413,460,000.00	100%	413,460,000.00
			Kegiatan 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Persentase rumah dinas dalam kondisi baik	-	-	-	100%	300,000,000.00	100%	285,000,000.00	100%	413,460,000.00	100%	413,460,000.00	100%	413,460,000.00	100%	413,460,000.00

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Awal (2021)	
						Tahun-1 (2016)		Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Program 16 Pembangunan Fasilitas Umum	**Fasum kota dalam kondisi layak**	**5 unit**	**5 unit**	**2,818,000,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 1 Pembangunan Fasilitas Umum	Sarana dan prasarana fasilitas umum terbangun	1 unit	1 unit	2,083,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Fasilitas Umum	Pemeliharaan bangunan fasilitas umum	4 unit	4 unit	735,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase sarana publik dalam kondisi baik	**Program 16 Pembangunan Fasilitas Umum**	**Persentase sarana publik dalam kondisi baik**	-	-	-	**100.00%**	**6,123,622,000.00**	**100.00%**	**8,122,828,750.00**	**100.00%**	**2,913,460,000.00**	**100.00%**	**2,913,460,000.00**	**100.00%**	**2,913,460,000.00**	**100.00%**	**2,913,460,000.00**
			Kegiatan 1 Pembangunan Fasilitas Umum	Persentase sarana publik dalam kondisi baik	-	-	-	100%	2,969,572,000.00	100%	7,529,701,000.00	100%	2,500,000,000.00	100%	2,500,000,000.00	100%	2,500,000,000.00	100%	2,500,000,000.00
			Kegiatan 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Fasilitas Umum		-	-	-	100%	3,154,050,000.00	100%	593,127,750.00	100%	413,460,000.00	100%	413,460,000.00	100%	413,460,000.00	100%	413,460,000.00
Mewujudkan tertib perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten	Terwujudnya tertib perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten	Prosentase jumlah bobot dokumen teknis rencana tata ruang yang telah disusun	**Program 17 Perencanaan Tata Ruang**	**Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas dan informasi rencana tata ruang yang bisa diakses publik**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**100.00%**	**783,574,950.00**	**100.00%**	**631,367,000.00**	**100.00%**	**662,935,000.00**	**100.00%**	**696,082,000.00**	**100.00%**	**730,886,000.00**	**100.00%**	**730,886,000.00**
			Kegiatan 1 Revisi Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen rencana tata ruang dan peta rencana tata ruang yang bisa	N/A	N/A	N/A	1 dokumen teknis	783,574,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan 2 Penyusunan Kebijakan tentang Penyusunan Tata Ruang	Jumlah dokumen rencana tata ruang dan peta rencana tata ruang yang bisa	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen teknis	631,367,000.00	2 dokumen teknis	662,935,000.00	1 dokumen teknis	696,082,000.00	2 dokumen teknis	730,886,000.00	2 dokumen teknis	730,886,000.00
		Prosentase penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang	**Program 18 Pengendalian Pemanfaatan Ruang**	**Penurunan ketidaksesuaian /pelanggaran pemanfaatan ruang**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**6.00%**	**105,280,000.00**	**4.00%**	**132,035,000.00**	**4.00%**	**135,335,000.00**	**2.00%**	**138,636,750.00**	**0.00%**	**141,937,500.00**	**0.00%**	**141,937,500.00**
			Kegiatan 1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang	Jumlah lokasi yang dievaluasi kesesuaian peruntukannya	N/A	N/A	N/A	50 lokasi	105,280,000.00	50 lokasi	132,035,000.00	50 lokasi	135,335,000.00	50 lokasi	138,636,750.00	50 lokasi	141,937,500.00	50 lokasi	141,937,500.00
				Prosentase rapat koordinasi untuk perencanaan, pegendalian pemanfaatan ruang	-	-		-		-		`100%		`100%		`100%		`100%	
Meningkatkan luasan RTH publik	Meningkatnya kualitas RTH publik	Persentase RTH publik yang berkualitas	**Program 19 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau**	**Prosentase jumlah lokasi RTH Publik yang**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**40.00%**	**1,074,039,000.00**	**55.00%**	**10,818,345,555.00**	**70.00%**	**5,050,000,000.00**	**85.00%**	**5,176,250,000.00**	**100.00%**	**5,305,650,000.00**	**100.00%**	**5,305,650,000.00**
			Kegiatan 1 Perencanaan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah lokasi RTH publik yang dibangun	N/A	N/A	N/A	4 lokasi RTH yang dibangun dan dibeli	1,074,039,000.00	6 lokasi RTH yang dibangun	10,818,345,555.00	6 lokasi RTH yang dibangun	5,050,000,000.00	6 lokasi RTH yang dibangun	5,176,250,000.00	6 lokasi RTH yang dibangun	5,305,650,000.00	6 lokasi RTH yang dibangun	5,305,650,000.00

BAB VII INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pengukuran kinerja adalah suatu proses yang obyektif dan sistematis dalam mengumpulkan, menganalisa dan menggunakan informasi untuk menentukan seberapa efektif dan efisien pelayanan pemerintah daerah disediakan dan sasaran dicapai.

Penggunaan sistem pengukuran kinerja memberikan manfaat dalam hal-hal berikut:

Pembuatan Kebijakan dan Pengawasannya– meningkatkan perumusan kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil keputusan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan dan kinerja pelayanan serta membuat keputusan realokasi sumber daya jika diperlukan.

Arahan Operasional– Memberikan cara yang lebih sistematis bagi para manajer untuk mendeteksi kekuatan dan kelemahan operasional serta untuk melakukan analisa program yang berkelanjutan.

Akuntabilitas– Dapat membantu dinas dan seluruh organisasi dalam memperolehkepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan yang diterima.

Perencanaan– Memfasilitasi perencanaan strategis dan operasional dengan cara menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut

Pengelolaan – Memberikandasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan efisiensi operasional dan cara untuk memperlihatkan seberapa efisien sumber daya digunakan dalam penyediaan pelayanan dan pencapaian tujuan

Penganggaran– Memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin membuat keputusan yang obyektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya, dan menginvestasikan kelebihan/surplus dana.

Menyerahkan penyediaan pelayanan kepada pihak luar– Membantu terciptanya iklim yang kompetitif dalam penyediaan pelayanan oleh pihak luar dengan cara memberikan data biaya dan kinerja yang didokumentasikan dengan baik serta memonitor kinerja pihakkontrakor berkaitan dengan kualitas pelayanan

Pengawasan Kerja – berguna dalam mencapai kinerja pegawai yang lebih baik dengan memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target kinerja dan memberikan masukan dan insentif.

Adapun Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD seperti terlihat pada tabel-tabel berikut ini :